



UNIVERSITAS INDONESIA

**EFEKTIVITAS DIREKTORAT PERAN SERTA
MASYARAKAT BNN DALAM MENINGKATKAN PERAN
SERTA MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA NARKOBA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

**JAMES RICKY TAMPUBOLON
0906505331**

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : James Ricky Tampubolon

NPM : 0906505331

Tanda Tangan :

Tanggal : Juli 2011

**UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : JAMES RICKY TAMPUBOLON
NPM : 0906505331
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian
Strategik Penanganan Narkoba
Judul Tesis : Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat
BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta
Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba

Dosen Pembimbing,

Dr. dr. H. Hadiman, SH. MSc.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : JAMES RICKY TAMPUBOLON
NPM : 0906505331
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian
Strategik Penanganan Narkoba
Judul Tesis : Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat
BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta
Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Strategik Penanggulangan Narkoba pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. dr. H. Hadiman, SH. MSc.

(.....)

Ketua Sidang : Prof. Dr. Chandra Wijaya, MM., M.Si.

(.....)

Penguji : Dr. M.H. Thamrin

(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, karena pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul *Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba*.

Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Studi Ketahanan Nasional, *Kajian Strategik Penanganan Narkoba pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia*.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Dr. dr. H. Hadiman, SH. MSc selaku Ketua Program Kajian Strategik Penanganan Narkoba dan juga Dosen Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran didalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., MM. selaku Plh Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia dan Ketua Sidang.
- (3) Para dosen di Universitas Indonesia yang banyak memberikan ilmu kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
- (4) Bapak Drs. Gories Mere selaku Kepala Badan Narkotika Nasional yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan pendidikan dan menyelesaikan tesis ini
- (5) Kepala Pusat Penelitian, Data dan Informasi BNN yang banyak memberikan kebijaksanaan kepada penulis sehingga penulis dapat lancar menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
- (6) Rekan-rekan di Puslitdatin BNN yang telah memberikan motivasi, masukan, kritik dan saran bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
- (7) Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material maupun moril.
- (8) Pihak Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan penulis.

- (9) Pihak instansi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat.
- (10) Vince Rini Siahaan, istri saya yang senantiasa memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
- (11) Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

JAMES RICKY TAMPUBOLON

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JAMES RICKY TAMPUBOLON
NPM / NIP : 0906505331
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan : Konsentrasi Kajian Stratejik Penanganan Narkoba
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Malam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2011
Yang menyatakan

(James Ricky Tampubolon)

ABSTRAK

Nama : James Ricky Tampubolon
Program studi : Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Penanganan Narkoba
Judul : Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba.

Situasi penyalahgunaan narkoba yang semakin mengkhawatirkan menuntut upaya penanganan serius yang melibatkan semua orang di lingkungannya masing-masing, seperti lingkungan pemerintah lingkungan swasta, lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Akan tetapi pola pikir dan ruang gerak masyarakat yang dapat memunculkan peranserta tersebut cenderung diabaikan, sehingga masyarakat tidak memiliki keberdayaan dan kemampuan untuk menangani masalah tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu usaha yang dapat merubah pola pikir dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat menangani masalah P4GN secara mandiri melalui suatu proses pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan masyarakat tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mencari gambaran mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka

Penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan pada bulan april – juni 2011 di berbagai institusi yang menjadi peserta dari kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN, serta di dalam lingkungan Direktorat Peran Serta Masyarakat bnn, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data yang didapat adalah hasil dari wawancara dengan beberapa informan terpilih dan akan dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif.

Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini adalah bahwa proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat bnn masih belum efektif. Hal ini dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan masih berada dalam tahap pemberian informasi dan pengetahuan tentang narkoba. Kegiatan yang dilaksanakan juga masih menghadapi beberapa kendala, seperti belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam perekrutan narasumber dan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini akan terlihat hasilnya nanti ketika Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring evaluasi di institusi peserta kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini. Dan diharapkan dengan adanya SOP, kendala yang dihadapi dapat teratasi.

Kata kunci:

Efektivitas, Peranserta, Pemberdayaan Masyarakat, Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRACT

Name : James Ricky Tampubolon
Study Program : Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik
Penanganan Narkoba
Title : The Effectiveness of Directorate of Public Participation BNN
to Increasing Community Participation In Danger Of Drugs

The situation of drug abuse which getting worse requires serious effort which involving everyone in the neighborhood, such as in government environment, private environment, educational environment and also community environment. Meanwhile the mindset and the space for people who may come up with such participation tends to be ignored, so that people do not have the empowerment and ability to handle such problems. Therefore we need something that can change the mindset and improve society's ability to handle P4GN problems independently through a process of community empowerment.

Due to these process of community empowerment in improving the ability of the community, then this research was conducted with aims to find a picture of the community empowerment process which undertaken by the Directorate of Community Participation BNN, knowing how the process of community empowerment that has been done to improve the ability of communities to tackle drug abuse in their environment.

The research was conducted for 2 (two) months in April - June 2011 in various institutions who participated in the activities of community empowerment programs implemented by BNN, and in the environment of Directorate of Community Participation BNN, using a qualitative approach, where the data obtained is the results of interviews with several selected informants and will be analyzed and described descriptively.

The conclusion from the results of this research is that process of community empowerment undertaken by the Directorate of Public Participation BNN is still not effective. This is because the activities carried out are still in the stage of providing information and knowledge about drugs. Activities undertaken also still face several obstacles, such as the lack of Standard Operating Procedure (SOP) in the recruitment of sources and implementation of community empowerment activities.

Community empowerment activities will be seen the results later when Directorate of Public Participation BNN conducting supervision and monitoring evaluation at institutional participant that have been implemented so far. And hopefully with the SOP, constraints can be overcome.

Keywords:

Effectiveness, Participation, Community Empowerment, Drugs Abuse

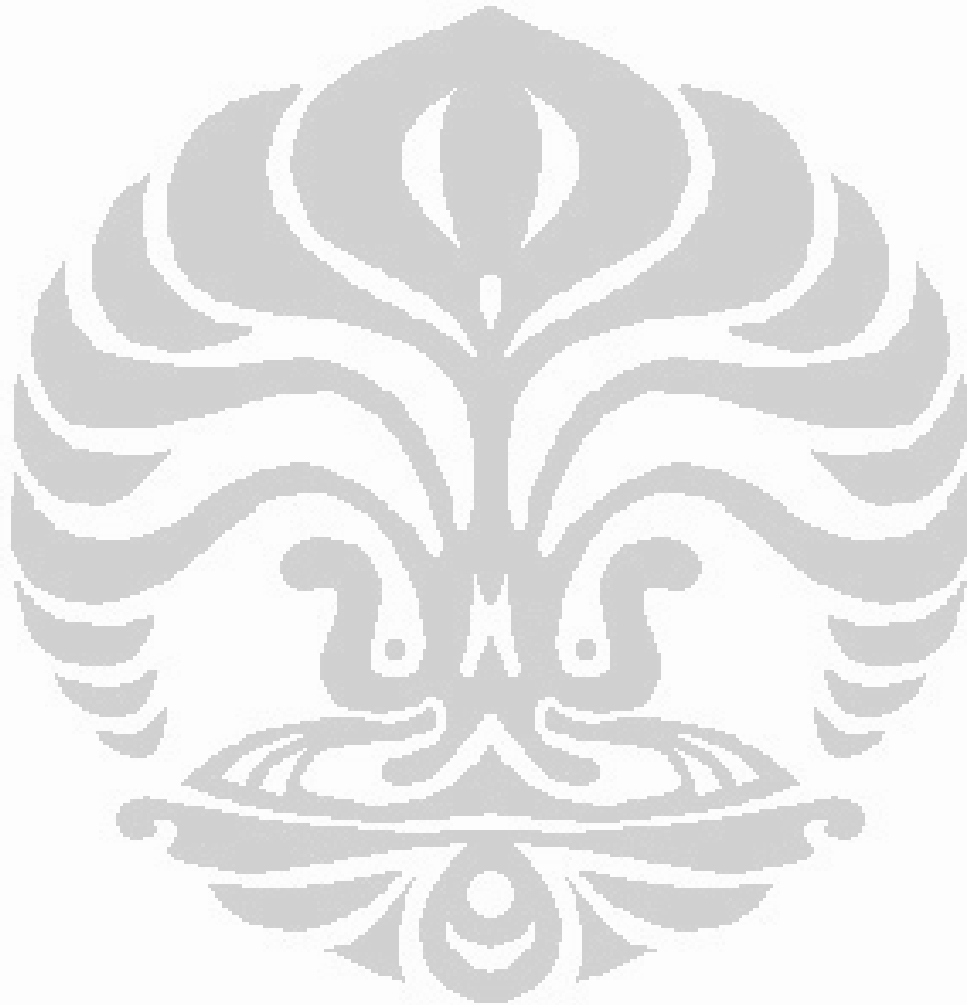
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Batasan Penelitian.....	9
1.6 Tata Urut Penulisan.....	9
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan tentang Efektivitas.....	11
2.1.1 Pengertian Efektivitas	11
2.2 Tinjauan Tentang Efektivitas Organisasi.....	11
2.2.1 Konsep Efektivitas	12
2.2.2 Efektivitas Organisasi.....	12
2.2.3 Pendekatan Efektivitas Organisasi.....	13
2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi.....	13
2.2.5 Kriteria Pengukuran Efektivitas Organisasi.....	15
2.3 Tinjauan Tentang Kinerja.....	19
2.3.1 Definisi Kinerja.....	19
2.3.2 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	23
2.3.3 Syarat Penilaian Kinerja	23
2.3.4 Metode Penilaian Kinerja	24
2.3.5 Cara - Cara untuk Meningkatkan Kinerja.....	26
2.4 Tinjauan Tentang Peran Serta Masyarakat.....	26
2.4.1 Definisi Peran Serta Masyarakat.....	26
2.4.2 Tujuan Peran Serta Masyarakat.....	29
2.4.3 Syarat Peran Serta Masyarakat.....	30
2.5 Organisasi dan Manajemen.....	38
2.5.1 Kepemimpinan.....	38
2.5.2 Motivasi.....	39
2.5.3 Manajemen.....	39
2.6 Penelitian Terdahulu.....	41

3. GAMBARAN UMUM.....	42
3.1 Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.....	42
3.2 Struktur Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN	42
3.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.....	43
3.3.1 Tugas Direktorat Peran Serta Masyarakat.....	43
3.3.1.1 Tugas Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan.....	43
3.3.1.2 Tugas Sub Direktorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat..	43
3.3.2 Fungsi Direktorat Peran Serta Masyarakat.....	44
4. METODE PENELITIAN.....	45
4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	45
4.2 Metode Penelitian.....	45
4.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
4.4 Teknik Pemilihan Informan.....	49
4.5 Deskripsi Informan.....	49
4.6 Informan.....	50
4.6.1 Informan Lingkungan Pekerjaan	51
4.6.2 Informan Lingkungan Pendidikan.....	51
4.6.3 Informan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.....	52
4.6.4 Informan Narasumber Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN...	52
4.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	53
4.8 Operasionalisasi Faktor-faktor Yang Akan Diteliti.....	53
5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
5.1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat BNN sebelum adanya Direktorat Peran Serta Masyarakat.....	58
5.1.1 Faktor Internal Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.....	58
5.1.2 Faktor Eksternal Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.....	64
5.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	67
5.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	69
5.2.2 Efektivitas dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	69
5.2.3 Tingkat Keberhasilan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.....	70
5.3 Analisa Hasil Penelitian.....	71
5.3.1 Faktor Pendukung Berhasilnya Program Pemberdayaan Masyarakat.....	71
5.3.2 Faktor Penghambat Bagi Berhasilnya Program Pemberdayaan Masyarakat.....	73
6. SIMPULAN DAN SARAN	75
6.1 Simpulan.....	75
6.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

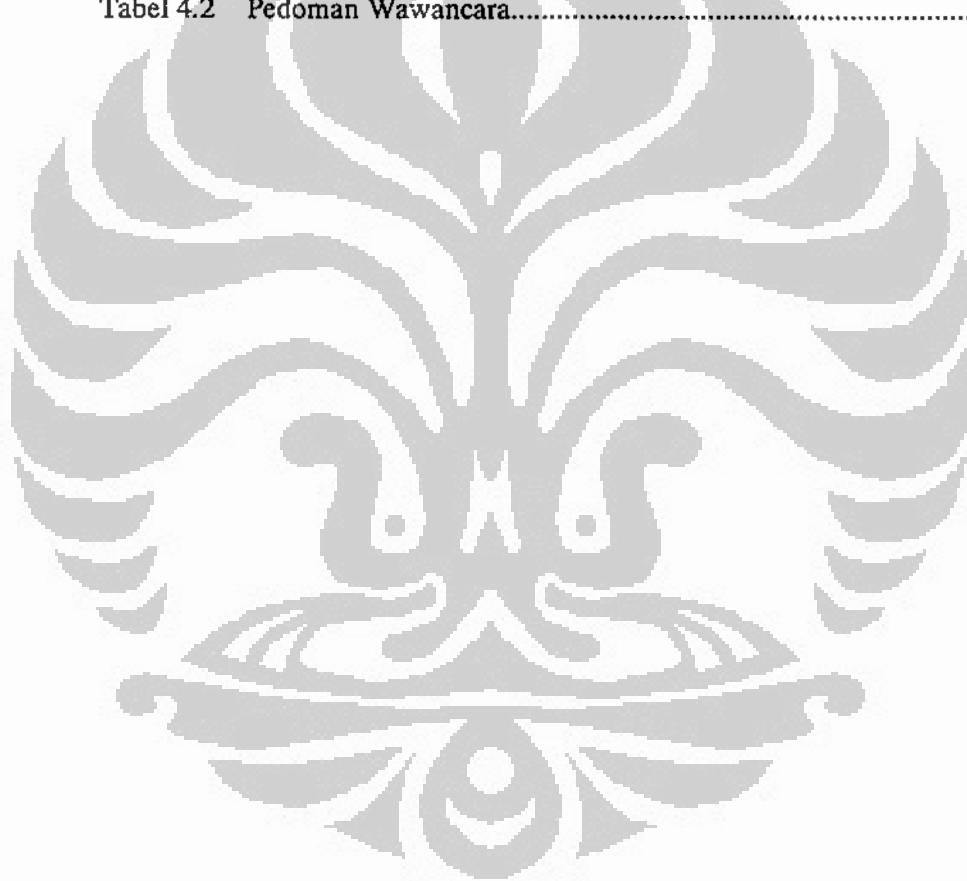
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Delapan tangga peran serta Arnstein.....	28
Gambar 3.1	Struktur Organisasi Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN...	42



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Faktor-Faktor Yang Menunjang Efektivitas.....	15
Tabel 2.2	Kriteria Keefektivan Organisasi.....	19
Tabel 2.3	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2008.....	31
Tabel 2.4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009.....	32
Tabel 2.5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010.....	33
Tabel 2.6	Kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan Tahun 2011.....	34
Tabel 2.7	Kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat Sub Direktorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat Tahun 2011.....	35
Tabel 4.1	Operasionalisasi Faktor-faktor Yang Akan Diteliti.....	54
Tabel 4.2	Pedoman Wawancara.....	54



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Pertanyaan Untuk Lingkungan Kerja.....	80
Lampiran 2	Pedoman Pertanyaan Untuk Lingkungan Pendidikan	82
Lampiran 3	Pedoman Pertanyaan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.....	84
Lampiran 4	Pedoman Pertanyaan Narasumber	86
Lampiran 5	Wawancara dengan Informan Peisonel Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN	88
Lampiran 6	Wawancara dengan Informan Narasumber Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN	95
Lampiran 7	Wawancara dengan Informan Institusi Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Pekerjaan	102
Lampiran 8	Wawancara dengan Informan Institusi Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Pendidikan	109



BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang penelitian yang akan memuat tentang situasi permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia secara umum, termasuk di dalamnya data penyalahgunaan narkoba dari hasil penelitian maupun jumlah kasus yang diungkap, perumusan dan tujuan permasalahan yang akan dibahas, manfaat penelitian secara umum dan khusus, batasan-batasan penelitian, metode dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian serta sistematika pembahasan dan penulisan dalam tiap bab berikutnya.

1.1 Latar Belakang

Situasi dan kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin memprihatinkan. Setiap tahun angka penyalahgunaan semakin meningkat, sedangkan upaya penanggulangan yang telah dilaksanakan hingga kini belum menjawab kebutuhan di lapangan. Dalam data tahun 2006-2009 menurut laporan Direktorat IV/TP Narkoba & KT Bareskrim Polri, tercatat jumlah kasus Narkoba meningkat dari 17.355 kasus pada tahun 2006 menjadi 30.878 kasus pada tahun 2009. Dari kasus-kasus tersebut, tercatat bahwa jumlah tersangka meningkat dari 31.603 orang pada tahun 2006 menjadi 38.173 orang pada tahun 2009 (Jurnal data P4GN).

Jumlah tersebut hanya sebagian kecil saja dari permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia. Fenomena ini ibarat gunung es, yang terlihat dan terdata hanya puncak gunung es-nya saja yang berada diatas permukaan, sedangkan sisanya yang jauh lebih banyak tidak terdata, terabaikan dan tersebar di masyarakat.

Maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menyebabkan permasalahan ini bukan hanya milik perorangan atau wilayah tertentu, namun sudah menjadi permasalahan nasional. Permasalahan yang ditimbulkan bukan hanya berakibat pada aspek

ekonomi, sosial, dan kesehatan saja, namun juga pada aspek keamanan dan ketahanan negara.

Disamping faktor-faktor tersebut diatas, salah satu faktor yang menyebabkan tingkat penyalahgunaan narkoba yang masih tinggi adalah ketidaktahuan dan ketidakpedulian masyarakat kita akan bahaya narkoba, baik dilingkungan sekolah, kantor maupun dilingkungan rumah atau tempat tinggal. Dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba ini, mengakibatkan sindrom pencrus bangsa ini ketergantungan berkepanjangan, yang pada akhirnya akan merusak kesadaran, serta kemauan dan kemampuan seseorang dalam menjalani kehidupan dan menatap masa depannya.

Tentunya dengan meningkatnya jumlah penyalahguna setiap tahunnya, maka jumlah kerugian negara pun akan meningkat pula. Kerugian tersebut utamanya diakibatkan oleh aktivitas penyelundupan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh jaringan penyelundup baik nasional maupun internasional.

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, dan pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang

operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika

Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas

UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Dalam rangka program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba (P4GN) dan pelaksanaan implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Prekursor Narkoba, maka BNN telah mengadakan berbagai kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengatasi permasalahan narkoba. Kebijakan akan optimal bila dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari secara efektif agar tujuan dibuat dapat tercapai.

Berdasarkan data yang dihimpun, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BNN dari tahun 2008 sampai Oktober 2010 mencakup antara lain Anti Drugs Goes to School and Campus, Kampanye Penanggulangan dan Peredaran Gelap Narkoba, yang bekerjasama dengan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Anti Narkoba, Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Lingkungan Media di DKI Jakarta, Penguatan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan Perguruan Tinggi Di DKI Jakarta, Pemberdayaan Di Lingkungan Kerja Dalam Rangka Perusahaan Bersih narkoba, dll.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan peran serta masyarakat sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dilaksanakan oleh Pusat Pencegahan (Pus Cegah) BNN. Selama itu, program pemberdayaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan memberikan informasi dan diperkenankan memberikan pendapat saja. Setelah pemberdayaan yg bersifat pengkaderan ini, tidak ada program selanjutnya yang dilaksanakan oleh institusi terkait. Dan juga tidak ada program dari BNN (Pus Cegah) untuk memonitor dan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan tersebut. Hal inilah yg menjadi permasalahan mendasar dari program pemberdayaan Pus Cegah BNN dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat. Tanpa adanya monitoring dan evaluasi dari hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, maka tidak diketahui tindak lanjut program pemberdayaan dan keberhasilan dari program pemberdayaan tersebut.

Hal ini coba diatasi dengan pembentukan Direktori Peran Serta Masyarakat, dimana merupakan hasil dari dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari PP Nomor 23 Tahun 2010 tersebut, maka dibentuklah Peraturan Kepala BNN (No: PER/03/V/2010/BNN) tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK). Dalam OTK tersebut dijelaskan tugas dan fungsi dari Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dimana sudah dimasukkan fungsi monitoring dan evaluasi dari hasil program yang telah dilaksanakan.

Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN mempunyai tujuan dan sasaran program antara lain :

1. Menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari narkoba.
2. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
3. Mewujudkan lingkungan keluarga yang harmonis dan bebas dari narkoba.

Tetapi hal ini ternyata belum berjalan karena monitoring dan evaluasi baru akan diadakan dalam program pemberdayaan di akhir tahun 2011 karena masih dalam tahap menyelesaikan program pemberdayaan masyarakatnya terlebih dahulu.

Menurut Arnstein, program pemberdayaan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN terdapat dalam tangga ketiga dan keempat (Delapan Tangga Peran Serta menurut Arnstein) dimana dalam tingkatan ini dikategorikan sebagai tingkat *Tokenisme*, yaitu tingkat dimana suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan.

Terkait dengan hal itu, sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang handal dan kinerja yang baik dalam meningkatkan peran serta masyarakat untuk hasil yang baik dan optimal dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat.

Tujuan utama dalam melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba adalah memberdayakan dan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal dan pekerjaannya. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk lebih memperkuat jaringan dalam menciptakan kesepahaman, pemikiran, dan kerja sama untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan tempat tinggal dan pekerjaannya.

Keberadaan sumber daya manusia memegang peranan penting. Tenaga pendidik mempunyai peranan yang besar dalam menjalankan aktivitas pemberdayaan. Potensi sumber daya manusia yang ada harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal.

Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan produk dari implementasi kebijakan. Berdasarkan

hal tersebut penulis akan melakukan penelitian dengan judul: EFEKTIVITAS DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT BNN DALAM MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT TERHADAP BAHAYA NARKOBA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN saat ini dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba?
2. Apa saja kendala, baik eksternal maupun internal yang dihadapi oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba?

1.3 Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang ingin diketahui dalam tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dalam upaya mendukung pencegahan Narkotika dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat BNN yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BNN dan sebagai masukan dalam membuat suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Batasan Penelitian

Dengan keterbatasan dan kemampuan pada diri penulis, terutama dalam hal keterbatasan waktu maka untuk memperoleh hasil yang optimal dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian di Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan narkotika Nasional dan beberapa institusi dimana dilakukan pemberdayaan masyarakat oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan narkotika Nasional.

1.6 Tata Urut Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-masing bab nantinya akan terdiri dari beberapa sub bab yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan tata urut penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi uraian tentang kajian teori yang berkaitan dengan teori yang melandasi penelitian yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yaitu mengenai efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba.

BAB III : GAMBARAN UMUM. Bab ini berisi uraian tentang Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan narkotika Nasional, Struktur, Fungsi dan Tugasnya.

BAB IV : METODE PENELITIAN. Bab ini berisi uraian yang lebih mendalam mengenai penggunaan metode dalam penelitian ini, terutama yang berkenaan dengan data yang diteliti dan

model yang digunakan dalam penelitian ini serta keterbatasan penelitian ini.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini berisi uraian tentang semua hasil wawancara dan observasi terhadap para informan dan analisa terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini dan pada bagian akhir akan diuraikan mengenai saran-saran dari peneliti.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dibahas berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan BNN yang meliputi efektivitas, peran serta masyarakat, organisasi dan manajemen, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kegiatan BNN dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba.

2.1 Tinjauan tentang Efektivitas

Dalam bagian ini akan dibahas tentang pengertian dari efektivitas menurut para ahli.

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :

“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Sondang P. Siagian (2001 : 24) memberikan definisi sebagai berikut : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”.

Sementara itu Abdurahmat (2003:92) berpendapat : “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan

sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.

Efektivitas (effectiveness) yang didefinisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan (per) tujuan. Tujuan yang bermula pada visi yang bersifat abstrak itu dapat dideduksi sampai menjadi kongkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, konsep hasil relatif, bergantung pada pertanyaan, pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan, hasil didefinisikan. Apakah pada titik output? Outcome? Feedback? Siapa yang mendefinisikannya: Pemerintah yang diperintah atau bersama-sama?

Efektivitas birokrasi yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintah menjadi hal yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan.

Mengutip Ensiklopedia administrasi, (The Liang Gie, 1967) menyampaikan pemahaman tentang efektivitas sebagai berikut: Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagai mana yang dikehendaki.

2.2. Tinjauan Tentang Efektivitas Organisasi

Pada bagian ini akan dibahas mengenai konsep efektivitas, efektivitas organisasi dan pendekatan efektivitas organisasi.

2.2.1 Konsep Efektivitas

Konsep efektivitas sesungguhnya merupakan suatu konsep yang luas, mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi. Konsep efektivitas ini oleh para ahli belum ada keseragaman pandangan, dan hal tersebut dikarenakan sudut pandang yang dilakukan dengan pendekatan disiplin ilmu yang berbeda, sehingga melahirkan konsep yang berbeda pula di dalam pengukurannya. Namun demikian, banyak juga ahli dan peneliti yang telah mengungkapkan apa dan bagaimana mengukur efektivitas itu.

2.2.2 Efektivitas Organisasi

Emitai Etzioni (1982:54) mengemukakan bahwa “efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk mencapai tujuan atau sasaran.” Komaruddin (1994:294) juga mengungkapkan “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.2.3 Pendekatan Efektivitas Organisasi

Robbins (1994:54) mengungkapkan juga mengenai pendekatan dalam efektivitas organisasi:

1. Pendekatan pencapaian tujuan (goal attainment approach).

Pendekatan ini memandang bahwa keefektivan organisasi dapat dilihat dari pencapaian tujuannya (ends) daripada caranya

(means). Kriteria pendekatan yang populer digunakan adalah memaksimalkan laba, memenangkan persaingan dan lain sebagainya. Metode manajemen yang terkait dengan pendekatan ini dikenal dengan Manajemen By Objectives (MBO) yaitu falsafah manajemen yang menilai keefektivan organisasi dan anggotanya dengan cara menilai seberapa jauh mereka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pendekatan Sistem.

Pendekatan ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kelangsungan hidup organisasi, maka perlu diperhatikan adalah sumber daya manusianya, mempertahankan diri secara internal dan memperbaiki struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi agar dapat berintegrasi dengan lingkungan yang darinya organisasi tersebut memerlukan dukungan terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

3. Pendekatan konstituensi-strategis.

Pendekatan ini menekankan pada pemenuhan tuntutan konstituensi itu di dalam lingkungan yang darinya orang tersebut memerlukan dukungan yang terus menerus bagi kelangsungan hidupnya.

4. Pendekatan nilai-nilai bersaing.

Pendekatan ini mencoba mempersatukan ke tiga pendekatan diatas, masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing didasarkan atas suatu kelompok nilai. Masing-masing nilai selanjutnya lebih disukai berdasarkan daur hidup di mana organisasi itu berada.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa pendekatan tujuan didasarkan pada pandangan organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Sedangkan pendekatan Multiple Constituency merupakan pendekatan yang menggabungkan pendekatan tujuan dengan

pendekatan sistem sehingga diperoleh satu pendekatan yang lebih tepat bagi tercapainya efektivitas organisasi. Sedangkan untuk pendekatan nilai-nilai bersaing merupakan pendekatan yang menyatukan ketiga pendekatan yang telah dikemukakan di atas yang disesuaikan dengan nilai suatu kelompok.

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut: (1) Adanya tujuan yang jelas, (2) Struktur organisasi. (3) Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat, (4) Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan pengarah dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M Steers (1985:209) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

Tabel 2.1

Faktor-Faktor Yang Menunjang Efektivitas

Karakteristik Organisasi	Karakteristik Lingkungan
<ul style="list-style-type: none"> • Struktur <ul style="list-style-type: none"> a. Desentralisasi b. Spesialisasi c. Formulasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ekstern <ul style="list-style-type: none"> a. Kekomplekan b. Kestabilan c. Ketidakstabilan

<ul style="list-style-type: none"> d. Rentang Kendali e. Besarnya Organisasi • Teknologi <ul style="list-style-type: none"> a. Besarnya Unit Kerja b. Operasi c. Bahan d. Pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Intern <ul style="list-style-type: none"> a. Orientasi Pada Karya b. Pekerja Sentris c. Orientasi Pada Imbalan Hukuman d. Keamanan Versus Resiko e. Keterbukaan Versus Pertahanan
Karakteristik Pekerja	Kebijakan dan Praktek Manajemen
<ul style="list-style-type: none"> a. Keterkaitan Pada Organisasi b. Ketertarikan c. Kemantapan Kerja d. Keikatan e. Prestasi Kerja f. Motivasi Tujuan dan Keterbukaan g. Kemampuan h. Kejelasan Peran 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Tujuan Strategis b. Pencarian dan Pemanfaatan Atas Sumber Daya c. Penciptaan Lingkungan Prestasi d. Proses Komunikasi e. Kepimpinan dan Pengambilan Keputusan f. Inovasi dan Adaptasi Organisasi

Sumber : Richard M. Steers (1985 : 8)

Di bawah ini penulis menguraikan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:8):

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap

organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.

3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

4. Karakteristik Manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pimpinan untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan atas sumber daya, penciptaan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Menurut pendapat di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Organisasi terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan, jika salah satu unsur memiliki kinerja yang buruk, maka akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.
2. Keefektivan membutuhkan kesadaran dan interaksi yang baik dengan lingkungan.
3. Kelangsungan hidup organisasi membutuhkan pergantian sumber daya secara terus menerus.

Apabila suatu perusahaan tidak memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi, maka perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuannya. Tetapi apabila suatu perusahaan memperhatikan faktor-faktor tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dapat lebih mudah tercapai, hal itu dikarenakan efektivitas akan selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.

2.2.5 Kriteria Pengukuran Efektivitas Organisasi

Tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi perlu memperhatikan kriteria-kriteria efektivitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Richard M Steers (1985:46) sebagai berikut: (1) Produktivitas. (2) Kemampuan berlaba. (3) Kesejahteraan pegawai

Secara lebih operasional, Emitai Atzoni yang dikutip oleh Indrawijaya (1989:227) mengemukakan "efektivitas organisasi akan tercapai apabila organisasi tersebut memenuhi kriteria mampu beradaptasi, berintegrasi, memiliki motivasi, dan melaksanakan produksi dengan baik".

Gibson (1984:32-34) berpendapat bahwa kriteria efektivitas meliputi:

1. Kriteria efektivitas jangka pendek: Produksi, Efisiensi, Kepuasan.
2. Kriteria efektivitas jangka menengah: Persaingan, dan Pengembangan
3. Kriteria efektivitas jangka panjang
4. Kelangsungan hidup

Sondang P Siagian (2000:32) mengungkapkan beberapa hal yang menjadi kriteria dalam pengukuran efektivitas:

Efektivitas dapat diukur dari berbagai hal, yaitu: kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana

dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, sistem pengawasan dan pengendalian yang mendidik.

Stephen P. Robbins (1994 : 55) mengungkapkan kriteria efektivitas organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Keefektivan Organisasi

NO	KRITERIA	NO	KRITERIA
1.	Kefektivitas Keseluruhan	16.	Konsesus
2.	Produktivitas	17.	Internalisasi Tujuan Organisasi
3.	Efisiensi	18.	Konsesus Tentang Tujuan
4.	Laba	19.	Keterampilan Interpersonal
5.	Kualitas		Manajerial
6.	Kecelakaan	20.	Keterampilan Manajerial
7.	Pertumbuhan	21.	Manajemen Infomasi dan
8.	Kemangkiran		Komunikasi
9.	Pergantian Pegawai	22.	Kesiapan
10.	Kepuasan Kerja	23.	Pemanfaatan Lingkungan
11.	Motivasi	24.	Evaluasi Pihak Luar
12.	Moral / Semangat Kerja	25.	Stabilitas
13.	Kontrol	26.	Nilai Sumber Daya Manusia
14.	Konflik / Solidaritas	27.	Partisipasi dan Pengaruh yang
15.	Perencanaan dan Pencapaian		Digunakan Bersama
	Tujuan	28.	Penekanan Pada Pelatihan dan
			Pengembangan
		29.	Penekanan Pada Performa

2.3 Tinjauan Tentang Kinerja

2.3.1 Definisi Kinerja

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67)
"Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), dan faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Mangkunegara (2000: 67):

a. Pengetahuan (knowledge)

Pengetahuan yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki karyawan. Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, media dan informasi yang diterima.

b. Ketrampilan (skill)

Kemampuan dan penguasaan teknis operasional dibidang tertentu yang dimiliki karyawan. Seperti ketrampilan konseptual (Conceptual Skill), ketrampilan manusia (Human Skill), dan Ketrampilan Teknik (Technical Skill).

c. Kemampuan (ability)

Kinerja Sumber daya manusia merupakan istilah yang berasal dari kata Job Performance atau Aktual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Definisi kinerja karyawan adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa kinerja SDM adalah prestasi kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000:67).

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh SDM atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan

kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi. (Prawiro Sentono, 1999)

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002:15) memberikan pengertian atas kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.

Menurut Gibson, dkk (2003: 355), job performance adalah hasil dari pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, efisiensi dan kinerja keefektifan kinerja lainnya. Sementara menurut Ilyas (1999: 99), kinerja adalah penampilan hasil kerja personil maupun dalam suatu organisasi. Penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memegang jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil di dalam organisasi.

Pengertian kinerja lainnya dikemukakan oleh Payaman Simanjuntak (2005:1) yang mengemukakan kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

Menurut Irawan (2002:11), bahwa kinerja (performance) adalah hasil kerja yang bersifat konkret, dapat diamati, dan dapat diukur. Jika kita mengenal tiga macam tujuan, yaitu tujuan organisasi, tujuan unit, dan tujuan pegawai, maka kita juga mengenal tiga macam kinerja, yaitu kinerja organisasi, kinerja unit, dan kinerja pegawai. Dessler (2000:87) berpendapat : Kinerja (prestasi kerja) karyawan adalah prestasi aktual karyawan dibandingkan dengan prestasi yang diharapkan dari karyawan.

Prestasi kerja yang diharapkan adalah prestasi standar yang disusun sebagai acuan sehingga dapat melihat kinerja karyawan sesuai dengan posisinya dibandingkan dengan standar yang dibuat. Selain itu dapat juga dilihat kinerja dari karyawan tersebut terhadap karyawan lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja lembaga (*institutional performance*) atau kinerja perusahaan (*corporate performance*) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan (*individual performance*) baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (*corporate performance*) juga baik.

Selanjutnya kinerja organisasi berhubungan erat dengan sasaran organisasi sebagai keadaan/kondisi yang ingin dicapai. Kinerja organisasi merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran melalui keberhasilan organisasi dalam mencapai sasarannya. Kinerja organisasi terkait dengan komunikasi manajemen informasi (*information management communication*) dan nilai SDM (*value of human resource*).

Kinerja Perusahaan/Organisasi, sesuai misi dan tugas pokok dari setiap perusahaan atau organisasi merupakan unit-unit secara berjenjang dari unit yang lebih besar ke unit yang lebih kecil dalam bentuk kelompok kerja, hingga menjadi tugas individu-individu dalam masing-masing kelompok atau unit kerja. Kinerja perusahaan/organisasi adalah agregasi atau akumulasi kinerja semua unit-unit organisasi, yang sama dengan penjumlahan kinerja semua orang atau individu yang bekerja di perusahaan tersebut.

2.3.2 Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Timpe (1993) faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu (p.33) :

1. Kinerja baik dipengaruhi oleh dua faktor :
 - a. Internal (pribadi). Faktor Internal mencakup kemampuan tinggi dan kerja keras.
 - b. Eksternal (lingkungan). Faktor eksternal meliputi pekerjaan mudah, nasib baik, bantuan dari rekan – rekan dan pemimpin yang baik.
2. Kinerja jelek dipengaruhi dua faktor :
 - a. Internal (pribadi), meliputi kemampuan rendah dan upaya sedikit.
 - b. Eksternal (lingkungan), meliputi pekerjaan sulit, nasib buruk, rekan - rekan kerja tidak produktif dan pemimpin yang tidak simpatik

2.3.3 Syarat Penilaian Kinerja

Terdapat kurang lebih dua syarat utama yang diperlukan guna melakukan penilaian kinerja yang efektif, yaitu (1) adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif; dan (2) adanya objektivitas dalam proses evaluasi (Gomes, 2003:136).

Sedangkan dari sudut pandang kegunaan kinerja itu sendiri, Sondang Siagian (2008-223-224) menjelaskan bahwa bagi individu penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan karirnya. Sedangkan bagi organisasi, hasil penilaian kinerja sangat penting dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan tentang berbagai hal seperti identifikasi kebutuhan program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, promosi, sistem balas jasa, serta berbagai aspek lain dalam proses manajemen sumber daya

manusia. Berdasarkan kegunaan tersebut, maka penilaian yang baik harus dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematis.

Dengan demikian, dalam melakukan penilaian atas prestasi kerja para pegawai harus terdapat interaksi positif dan kontinu antara para pejabat pimpinan dan bagian kepegawaian

2.3.4 Metode Penilaian Kinerja

Terdapat dua metode dalam mengukur prestasi kerja, sebagaimana diungkapkan oleh Gomes (2003:137-145), yaitu :

1. Metode Tradisional.

Metode ini merupakan metode tertua dan paling sederhana untuk menilai prestasi kerja dan diterapkan secara tidak sistematis maupun sistematis. Yang termasuk kedalam metode tradisional adalah : rating scale, employee comparison, check list, free form essay, dan critical incident. (a) Rating scale. Metode ini merupakan metode penilaian yang paling tua dan banyak digunakan, dimana penilaian yang dilakukan oleh atasan atau supervisor untuk mengukur karakteristik, misalnya mengenai inisiatif, ketergantungan, kematangan, dan kontribusinya terhadap tujuan kerjanya. (b) Employee comparison. Metode ini merupakan metode penilaian yang dilakukan dengan cara membandingkan antara seorang pegawai dengan pegawai lainnya. Metode ini terdiri dari : (1) Alternation ranking : yaitu metode penilaian dengan cara mengurutkan peringkat (ranking) pegawai dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. (2) Paired comparison : yaitu metode penilaian dengan cara seorang pegawai dibandingkan dengan seluruh pegawai lainnya, sehingga terdapat berbagai alternatif keputusan yang akan diambil. Metode ini dapat digunakan untuk jumlah pegawai yang relatif sedikit. (3) Porced comparison (grading) :

metode ini sama dengan paired comparison, tetapi digunakan untuk jumlah pegawai yang relative banyak. (c) Check list. Metode ini hanya memberikan masukan/informasi bagi penilaian yang dilakukan oleh bagian personalia. (d) Freeform essay. Dengan metode ini seorang penilai diharuskan membuat karangan yang berkenaan dengan orang/karyawan/pegawai yang sedang dinilainya. (e) Critical incident Dengan metode ini penilai harus mencatat semua kejadian mengenai tingkah laku bawahannya sehari-hari yang kemudian dimasukkan kedalam buku catatan khusus yang terdiri dari berbagai macam kategori tingkah laku bawahannya. Misalnya mengenai inisiatif, kerjasama, dan keselamatan.

2. Metode Modern.

Metode ini merupakan perkembangan dari metode tradisional dalam menilai prestasi kerja. Yang termasuk kedalam metode modern ini adalah : assesment centre, Management By Objective (MBO=MBS), dan human asset accounting.

Assesment centre. Metode ini biasanya dilakukan dengan pembentukan tim penilai khusus. Tim penilai khusus ini bisa dari luar, dari dalam, maupun kombinasi dari luar dan dari dalam.

Management by objective (MBO = MBS). Dalam metode ini pegawai langsung diikutsertakan dalam perumusan dan pemutusan persoalan dengan memperhatikan kemampuan bawahan dalam menentukan sasarannya masing-masing yang ditekankan pada pencapaian sasaran perusahaan.

Human asset accounting. Dalam metode ini, faktor pekerja dinilai sebagai individu modal jangka panjang sehingga sumber tenaga kerja dinilai dengan cara membandingkan terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan.

2.3.5 Cara - Cara untuk Meningkatkan Kinerja

Berdasarkan pernyataan menurut Timpe (1993) cara - cara untuk meningkatkan kinerja, antara lain (p. 37) :

1. Diagnosis

Suatu diagnosis yang berguna dapat dilakukan secara informal oleh setiap individu yang tertarik untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengevaluasi dan memperbaiki kinerja. Teknik - tekniknya : refleksi, mengobservasi kinerja, mendengarkan komentar - komentar orang lain tentang mengapa segala sesuatu terjadi, mengevaluasi kembali dasar - dasar keputusan masa lalu, dan mencatat atau menyimpan catatan harian kerja yang dapat membantu memperluas pencarian manajer penyebab - penyebab kinerja.

2. Pelatihan

Setelah gaya atribusional dikenali dan dipahami, pelatihan dapat membantu manajemen bahwa pengetahuan ini digunakan dengan tepat.

3. Tindakan

Tidak ada program dan pelatihan yang dapat mencapai hasil sepenuhnya tanpa dorongan untuk menggunakannya. Analisa atribusi kausal harus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari tahap - tahap penilaian kinerja formal.

2.4 Tinjauan Tentang Peran Serta Masyarakat

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi, tujuan dan syarat-syarat dari peran serta masyarakat.

2.4.1 Definisi Peran Serta Masyarakat

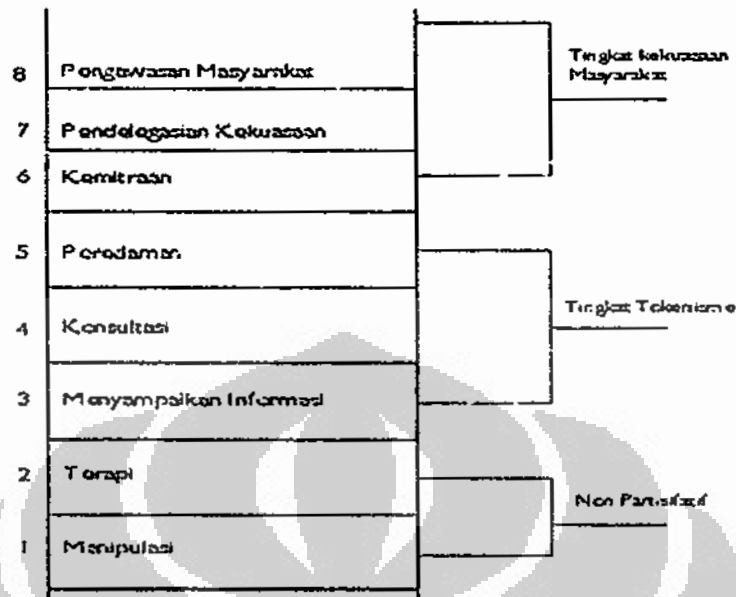
Peran serta masyarakat adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan (Canter, 1977).

Peran serta masyarakat adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh (Arnstein, 1969).

Secara sederhana didefinisikan *feedforward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu).

Arnstein (1969) menformulasikan peran serta masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat (*citizen participation is citizen power*). Dimana terjadi pembagian kekuatan (*power*) yang memungkinkan masyarakat yang tidak mempunya (*the have-not citizens*) yang sekarang dikucilkan dari proses politik dan ekonomi untuk terlibat kelak. Singkat kata, peran serta masyarakat - menurut Arnstein - adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Lewat typologinya yang dikenal dengan Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat (*Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation*), Arnstein menjabarkan peran serta masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir. Arnstein juga menekankan bahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat upacara semu (*empty ritual*) dengan bentuk peran serta yang mempunyai kekuatan nyata (*real power*) yang diperlukan untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses.

Gambar 2.1 Delapan tangga peran serta Arnstein



Sumber : Sherry R Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation", Journal of the American Institute of Planners, 35 (1969)

Dua tangga terbawah dikategorikan sebagai "non peran serta", dengan menempatkan bentuk-bentuk peran serta yang dinamakan (1) terapi dan (2) manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk "mendidik" dan "mengobati" masyarakat yang berperan serta.

Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai tingkat "Tokenisme" yaitu suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi mereka tidak boleh memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut Arnstein, jika peran serta hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Termasuk dalam tingkat "Tokenisme" adalah (3) penyampaian informasi (informing); (4) konsultasi; dan (5) peredaman kemarahan (placation).

Selanjutnya Arnstein mengategorikan tiga tangga teratas kedalam tingkat "kekuasaan masyarakat" (citizen power). Masyarakat dalam tingkatan ini memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dengan menjalankan (6) kemitraan (partnership) dengan memiliki kemampuan tawar-menawar bersama-sama pengusaha atau pada tingkatan yang lebih tinggi (7) pendelegasian kekuasaan (delegated power) dan (8) pengawasan masyarakat (citizen control). Pada tingkat ketujuh dan kedelapan, masyarakat (non elite) memiliki mayoritas suara dalam proses pengambilan keputusan keputusan bahkan sangat mungkin memiliki kewenangan penuh mengelola suatu obyek kebijaksanaan tertentu.

Delapan tangga peran serta dari Arnstein ini memberikan pemahaman kepada kita, bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk memanipulasi program peran serta masyarakat menjadi suatu cara yang mengelabui (devious method) dan mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

2.4.2 Tujuan Peran Serta Masyarakat

Tujuan dari peran serta masyarakat sejak tahap perencanaan adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan lingkungan (Canter, 1977). Karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan (interest groups), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut dan menuangkannya ke dalam konsep. Pandangan dan reaksi masyarakat itu, sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan dan arah yang positif dari berbagai faktor.

Perlunya peran serta masyarakat telah pula diungkapkan oleh Prof. Koesnadi Hardjosoemantri (1990) bahwa selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat akan mereduksi kemungkinan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan. Selanjutnya, peran serta masyarakat akan membantu perlindungan hukum. Bila suatu keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan, maka akan memperkecil kemungkinan pengajuan perkara ke pengadilan. Karena masih ada alternatif pemecahan yang dapat diambil sebelum sampai pada keputusan akhir.

2.4.3 Syarat Peran Serta Masyarakat

Terhadap hal di atas, Hardjosoemantri melihat perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna (1) Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa kegiatan mengumumkan rencana kegiatannya. (2) Informasi Lintas-batas (transfortier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada kemungkinan kerusakan lingkungan di satu daerah akan pula mempengaruhi propinsi atau negara tetangga. Sehingga pertukaran informasi dan pengawasan yang melibatkan daerah-daerah terkait menjadi penting; (3) Informasi tepat waktu (timely information); suatu proses peran serta masyarakat yang efektif memerlukan informasi yang sedini dan seteliti mungkin, sebelum keputusan terakhir diambil. Sehingga, masih ada kesempatan untuk memepertimbangkan dan mengusulkan alternatif-alternatif pilihan; (4) Informasi yang lengkap dan menyeluruh (comprehensive information); walau isi dari suatu informasi akan berbeda tergantung keperluan bentuk kegiatan yang direncanakan, tetapi pada intinya informasi itu haruslah menjabarkan rencana kegitana secara rinci termasuk

alternatif-alternatif lain yang dapat diambil (5) Informasi yang dapat dipahami (comprehensive information); seringkali pengambilan keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan adalah kewajiban untuk membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.

Syarat lain yang dapat ditambahkan selain yang telah diuraikan diatas, adalah keharusan adanya kepastian dan upaya terus-menerus untuk memasok informasi agar penerima informasi dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pemberi informasi.

Rahardjo (1989) melihat pemerintah merupakan agen utama dalam segenap kegiatan masyarakat, termasuk pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan itu. Dalam konteks ini, sinyalemen diatas menjadi nyata, ketika pada akhirnya peran serta masyarakat hanyalah merupakan proses tarik-menarik antara pemerintah dan pihak masyarakat. Dimana masyarakat hanyalah mampu untuk mencari ruang gerak peran serta masyarakat yang telah diciptakan pemerintah.

Tabel 2.3

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2008

1	Penerapan Program P4GN Bidang Pencegahan Melalui Pemberdayaan Parenting Skill (Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak)	DKI Jakarta	2008
2	Penerapan Program P4GN Bidang Pencegahan Melalui Unit Kesehatan Mahasiswa (UKM)	DKI Jakarta	2008
3	Penerapan Program P4GN Bidang Pencegahan Melalui Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	DKI Jakarta	2008
4	Anti Drugs Campaign Goes To School and Campus	DKI Jakarta	2008

Tabel 2.4**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2009**

1	Pemberdayaan Potensi Masyarakat bagi Lingkungan Pendidikan (IPDN) Angkatan I, II dan III	Sumedang, Jawa Barat,	2009
2	Pemberdayaan Potensi Masyarakat di Lingkungan Mahasiswa PTIK Angkatan 52, 53	DKI Jakarta	2009
3	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Lingkungan Media di Jawa Timur	Surabaya Jawa Timur	2009
4	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Penyandang Cacat di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2009
5	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Lingkungan Kerja di Sumatera Selatan	Palembang, Sumatera Selatan	2009
6	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Lingkungan Kerja di Papua	Jayapura, Irian Jaya	2009
7	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Lingkungan Media di DKI Jakarta	Lido, Sukabumi	2009
8	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Tenaga Kerja di Kepulauan Riau	Lido, Sukabumi	2009
9	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Lingkungan Tenaga Kerja di Jawa Timur	Surabaya, Jawa Timur	2009
10	Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Bidang Seni	DKI Jakarta	2009
11	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Lingkungan Media di Sulawesi Selatan	Makassar, Sulawesi Selatan	2009
12	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Lingkungan Tokoh Agama di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2009
13	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Bagi Lingkungan Media di Sulawesi Utara	Manado, Sulawesi Utara	2009
14	Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Bidang Musik di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2009

Tabel 2.5**Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2010**

1	Pemberdayaan Di Lingkungan Kerja Dalam Rangka Perusahaan Bersih Narkoba	Depok, Jawa Barat	2010
2	Pemberdayaan Masyarakat bagi BUMN Di PT. Pos Indonesia (PERSERO)	Bandung, Jawa Barat	2010

3	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penguatan Kader Anti Narkoba Bagi Lingkungan Perguruan Tinggi Di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2010
4	Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Kerja Dalam Rangka Perusahaan Bersih Narkoba Di PT. Sanyo Jaya Components Indonesia	Depok, Jawa Barat	2010
5	Pemberdayaan Masyarakat Bagi BUMN Di PT. Pindad (PERSERO)	Bandung, Jawa Barat	2010
6	Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Kerja Dalam Rangka Perusahaan Bersih Narkoba Bagi Sekuriti dan Staf Perusahaan	Depok, Jawa Barat	2010
7	Pemberdayaan di Lingkungan Kerja dalam rangka Perusahaan Bersih Narkoba di Jabodetabek (Banten)	Banten	2010
8	Pemberdayaan dalam rangka Penguatan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan SMP di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2010
9	Pemberdayaan dalam rangka Penguatan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan Kerja di Jawa Barat	Bandung, Jawa Barat	2010
10	Pemberdayaan dalam rangka Penguatan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan Kerja di Jawa Tengah	Semarang, Jawa Tengah	2010
11	Pemberdayaan dalam rangka Penguatan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan SMA di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2010
12	Pemberdayaan dalam rangka Penguatan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan Kerja di Jawa Timur	Surabaya, Jawa Timur	2010
13	Pemberdayaan Masyarakat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jawa Barat	Bandung, Jawa Barat	2010
14	Pemberdayaan dalam rangka Penguatan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jogjakarta	2010
15	Pemberdayaan dalam rangka Perluasan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan Kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta	Jogjakarta	2010
16	Pemberdayaan dalam rangka Penguatan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Organisasi Kewanitaan di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2010
17	Pemberdayaan dalam rangka Perluasan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Organisasi Kewanitaan di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2010
18	Pemberdayaan dalam rangka Penguatan Kader Anti Narkoba di Lingkungan Organisasi Kemasyarakatan di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2010
19	Pemberdayaan Dalam Rangka Penguatan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan Kerja di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2010
20	Pemberdayaan Dalam Rangka Perluasan Kader Anti Narkoba bagi Lingkungan Kerja di DKI Jakarta	DKI Jakarta	2010

Tabel 2.6

**Kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat Sub Direktorat Lingkungan
Pendidikan Tahun 2011**

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	TEMPAT	PESERTA
1	21 February 2011	Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Peran Serta Masyarakat	Hotel Maharani	Ditjen Dikti Kemendiknas Dit Pembinaan SMP Dit Pembinaan SMA Dinas Pendidikan DKI Dinas Pendidikan Depok Dinas Pendidikan UI Dinas Pendidikan UKI Dinas Pendidikan Trisakti Dinas Pendidikan Paramadina Dinas Pendidikan UIN BNP DKI LSM
2	10 March 2011	Rapat Koordinasi Lingkungan Perguruan Tinggi Bebas Narkoba	Hotel Maharani	Mahasiswa Univ.Indonesia Mahasiswa Univ. Trisakti Mahasiswa Univ. Paramadina Mahasiswa London School Mahasiswa UPH
3	24 March 2011	Rapat Koordinasi Di DKI Jakarta	Hotel Maharani	Mahasiswa Univ. Atmajaya Mahasiswa Univ. Tarumanegara Mahasiswa Univ. Moestopo Mahasiswa Univ. Gunadarma Mahasiswa Univ. Pancasila Mahasiswa Univ. Budi Luhur
4	25 March 2011	Rapat Koordinasi Lingkungan Perguruan Tinggi Bebas Narkoba	Hotel Maharani	Mahasiswa BINUS Mahasiswa ISTN Mahasiswa Univ. Syahid Mahasiswa Univ. Nasional Mahasiswa UIN Mahasiswa Ibnu Khaldun
5	19-20 April 2011	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pembentukan Satgas Kampus Bebas Narkoba	Universitas Pelita Harapan, Karawaci	Mahasiswa UPH Mahasiswa ITI

6	26-27 April 2011	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pembentukan Satgas Kampus Bebas Narkoba	Golden Boutique Hotel, Blok M	Mahasiswa UIN Mahasiswa Univ.Nasional Mahasiswa ISTN Mahasiswa Univ.Paramadina Mahasiswa Univ.Gunadarma
7	29 April 2011	Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Kampus Di DKI Jakarta	Universitas Pelita Harapan, Karawaci	Dosen, Security, Orang Tua
8	23 Mei 2011 s.d. 26 May 2011	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Lingkungan Pesantren Bebas Narkoba Di Jawa Barat	Hotel Crown, Tasikmalaya Kota	Santriwan dan Santriwati Ponpes Suryalaya
9	30 Mei 2011 s.d. 02 Juni 2011	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Lingkungan Pesantren Bebas Narkoba Di Jawa Timur	Hotel Satelit, Surabaya	Santriwan dan Santriwati

Tabel 2.7

Kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat Sub Direktorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat Tahun 2011

NO	TANGGAL	NAMA KEGIATAN	TEMPAT	PESERTA
1	19-Feb-2011	"Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang PSM"	Hotel Maharani, DKI Jakarta	Kelompok Ahli Terapi dan Rehabilitasi Granat FK LSM AN Gannas Humas BNN Dep. Dayamas Kapeta YCAB Dit Pertamas Presnas

2	23-Feb-2011	"Rapat Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang PSM"	Hotel Maharani, DKI Jakarta	Kementerian Dalam Negeri Kemenaker Trans Kemensos Kemen Huk dan HAM Kalakhar BNP DKI Jakarta PT Pos Indonesia PT Pertamina Persero PT Sanyo Jaya Indonesia PT Indo Mobil PT Astra PT MCA Sekjen FK LSM AN
3	11-Mar-2011	"Rakoor Lingk Kerja Pemerintahan Bebas Narkoba di DKI"	Hotel Maharaja, DKI Jakarta	Dit TP Narkoba Barekrim Polri Kolinlamil Kemenpora Puskompublik Kemenkes Badan POM RI BPHN Kemenkum HAM BNP DKI Jakarta Kemen Kominfo Kemensos FK LSM AN Perum BULOG PDRI Pemberdayaan Perempuan BNN
4	22 - 23 Mar 2011	Pemberdayaan Masy. Dlm Rangka Lingk Kerja Bebas Narkoba Bagi 5 Lingk Kerja Pemerintahan di DKI	Hotel Kaisar, DKI Jakarta	Kolinlamil Brimob Kemenpora BPHN/Kemenkum HAM PMD/PSPP/Kemensos
5	29 - 30 Mar 2011	Pemberdayaan Masy. Dlm Rangka Lingk Kerja Bebas Narkoba Bagi 5 Lingk Kerja Pemerintahan di Sulut	Sintesa Peninsula, Manado	Kementerian Agama Dit Res Narkoba Imigrasi Potresta BKKBN Dispora Polda Kanwil Agama TVRI Dinas Sosial KPA

				BPP & PA Perempuan Rumah Sakit KPID Kodim Dinkes Universitas Samratulangi Dishub Kominfo
6	13 - 14 April 2011	Pemberdayaan Masy. Dlm Rangka Lingk Kerja Bebas Narkoba Bagi 5 Lingk Kerja Pemerintahan di Kepri	Hotel Nagoya Plaza, Batam	B POM Batam Polda Kepri Polresta Lapas Batam BKKBN
7	28-Apr-2011	Rakor Lingk Kerja Swasta Bebas Narkoba di DKI	Hotel Cipta 2, DKI Jakarta	PT Multi Central Areaguna PT Japfa PT Pertamina FK LSM AN BNNP DKI Jakarta PT Panasonic PT Mustika Ratu PT Nurkarya Pratama PT Markam Jaya PT Sanyo PT Multi Unggul Prima PT Secret Recipe PT Khong Guan PT Centex Dit Pemberdayaan Alternative PT Astra PT Indomilk PT Yanmar
8	19 - 20 Mei 2011	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Lingk. Kerja Bebas Narkoba Bagi 3 Lingk. Kerja Swasta di DKI	Wisma PKBI, DKI Jakarta	
9	09 - 10 Juni 2011	"Workshop Anti Narkoba Bagi LingjaPem & Swasta"	Wisma PKBI, DKI Jakarta	
10	06 - 07 Juni 2011	"Workshop Anti Narkoba Bagi Ling Masy."	Wisma PKBI, DKI Jakarta	

2.5 Organisasi dan Manajemen

Dalam bagian ini dibahas mengenai kepemimpinan, motivasi dan manajemen.

2.5.1 Kepemimpinan

Kemampuan dan ketrampilan kepemimpinan dalam pengarahan juga merupakan faktor penting efektivitas dalam pengorganisasian. Bila organisasi dapat mengidentifikasi kualitas-kualitas yang berhubungan dengan kepemimpinan, kemampuan untuk menyeleksi pemimpin-pemimpin yang efektif akan meningkat, bila organisasi dapat mengidentifikasi perilaku dan teknik-teknik kepemimpinan efektif organisasi, berbagai perilaku dan teknik tersebut akan dapat dipelajari

Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya.

Secara umum atribut personal atau karakter yang harus ada atau melekat pada diri seorang pemimpin adalah:

1. Mumpuni, artinya memiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih baik daripada orang-orang yang dipimpinnya
2. Juara, artinya memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik yang lebih baik dibanding orang-orang yang dipimpinnya.
3. Tanggung jawab, artinya memiliki kemampuan dan kemauan bertanggungjawab yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpinnya.
4. Aktif, artinya memiliki kemampuan dan kemauan berpartisipasi sosial dan melakukan sosialisasi secara aktif lebih baik dibanding orang-orang yang dipimpinnya.

5. Walaupun tidak harus, sebaiknya memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi dibanding orang-orang yang dipimpinnya.

Hill dan Caroll (1997) berpendapat bahwa, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.

2.5.2 Motivasi

Disamping faktor kepemimpinan, faktor motivasi yang akan mempengaruhi kinerja pegawai yang dimiliki seseorang adalah merupakan potensi, dimana seseorang belum tentu bersedia untuk mengerahkan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai hasil yang optimal, sehingga masih diperlukan adanya pendorong agar seseorang mau menggunakan seluruh potensinya.

Hasibuan (2000: 142) motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.

Jadi motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi bawahannya, agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Pentingnya motivasi karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan dan mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.

2.5.3 Manajemen

Dalam suatu organisasi, manajemen merupakan kegiatan utama yang mutlak harus ada. Tanpa adanya manajemen pencapaian tujuan organisasi mustahil dapat dicapai dengan sukses. Manajemen merupakan inti dari pengorganisasian itu sendiri

sehingga tidak dapat dilepaskan dari organisasi. Manajemen merupakan sebuah rangkaian aktivitas untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Millett dalam Siswanto (1987: 4) membatasi manajemen sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Ia menekankan manajemen sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan.

Sedangkan Stoner dalam Handoko (2000), mendefinikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut Hersey dan Blanchard dalam Siswanto (2007: 2) memberikan batasan manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian terdapat tiga alasan utama diperlukannya manajemen:

- a. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
- c. Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Dalam suatu organisasi, manajemen merupakan kegiatan utama yang mutlak harus ada. Tanpa adanya manajemen pencapaian tujuan organisasi mustahil dapat dicapai dengan sukses. Manajemen merupakan inti dari pengorganisasian itu sendiri sehingga tidak dapat dilepaskan dari organisasi. Manajemen merupakan sebuah rangkaian aktivitas untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Millett dalam Siswanto (1987: 4) membatasi manajemen sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Ia menekankan manajemen sebagai suatu proses, yaitu suatu rangkaian aktivitas yang satu sama lain saling berurutan.

Sedangkan Stoner dalam Handoko (2000), mendefinikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.6 Penelitian terdahulu

Belum pernah ada penelitian yang dilakukan terkait dengan efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap narkoba. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat BNN yang akan datang dan juga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi BNN dan sebagai masukan dalam membuat suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN resmi terbentuk di tahun 2010, dimana sebelumnya hanya berada di dalam struktur Pusat Pencegahan (Pus Cegah) Sub Bidang Peran Serta BNN. Dengan adanya perubahan struktur organisasi BNN setelah penetapan Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika tahun 2009 dan kemudian dibentuknya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, dilanjutkan dengan dibentuknya Peraturan Kepala BNN (No: PER/03/V/2010/BNN) tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang menjelaskan tentang struktur, tugas dan fungsi dari Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Dengan dibentuknya Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, semakin luas fungsi dan tugas dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN. Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN terbagi menjadi Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan dan sub Direktorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat.

3.2 Struktur Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

Gambar 3.1

Struktur Organisasi Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN



3.3 Tugas dan Fungsi Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

Pada bagian ini menjelaskan tentang tugas dan fungsi dari Direktorat Peran Serta Masyarakat

3.3.1 Tugas Direktorat Peran Serta Masyarakat

Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN merupakan bagian dari Deputi Pemberdayaan Masyarakat. Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN yang mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka P4GN melalui peran serta masyarakat. Direktorat Peran Serta Masyarakat terdiri dari dua Sub Direktorat, yaitu Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan dan Sub Direktorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat, yang memiliki tugasnya masing-masing.

3.3.1.1 Tugas Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan

Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan, dan mempunyai fungsi pemetaan dan analisis peran serta lingkungan pendidikan juga pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan.

Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan terdiri atas Seksi Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertugas melakukan penyiapan, pemetaan dan analisis peran serta lingkungan dasar dan menengah dan juga Seksi Pendidikan Tinggi yang bertugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan pendidikan tinggi.

3.3.1.2 Tugas Sub Direktorat Lingkungan kerja dan Masyarakat

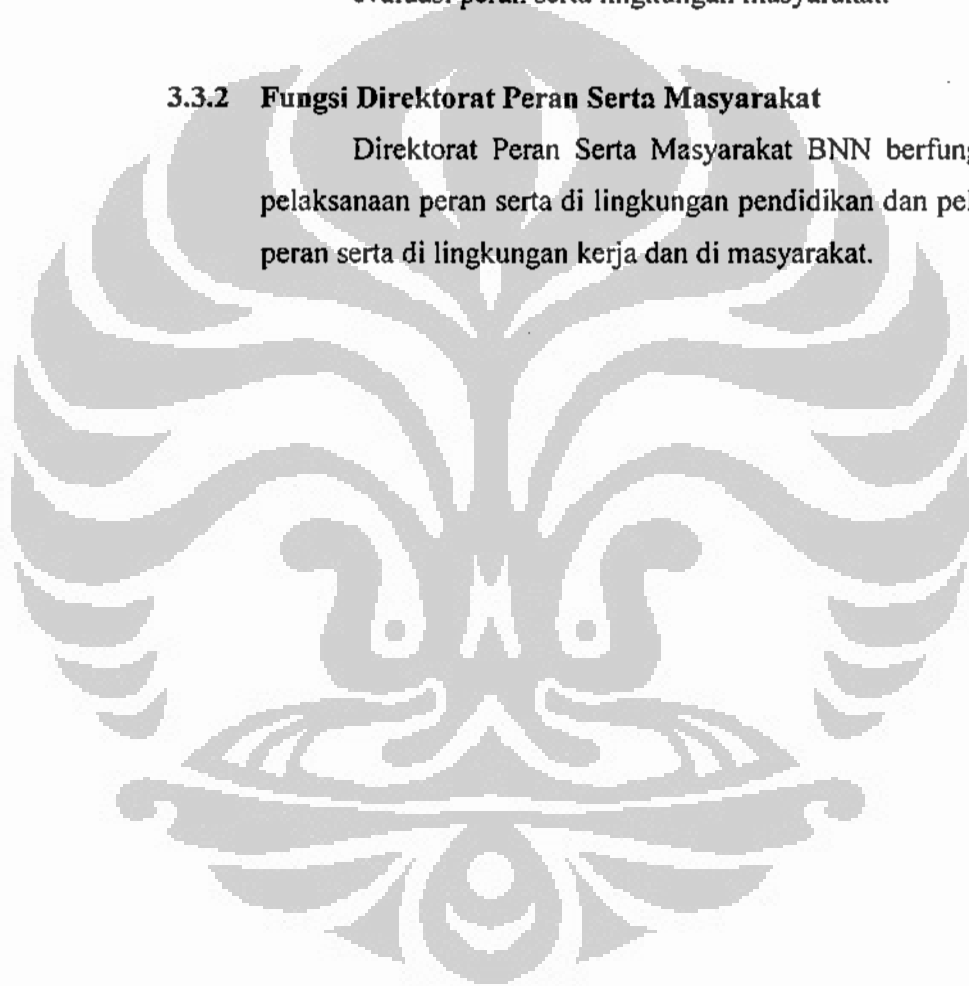
Sub Direktorat Lingkungan kerja dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemetaan, analisis, pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan kerja dan masyarakat, dan menyelenggaraan fungsi pemetaan dan

analisis peran serta lingkungan kerja, juga pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat.

Sub Direktorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat terdiri dari Seksi Lingkungan Kerja yang mempunyai tugas melakukan penyiapan, pemetaan dan analisis peran serta lingkungan kerja serta Seksi Lingkungan Masyarakat yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan dan evaluasi peran serta lingkungan masyarakat.

3.3.2 Fungsi Direktorat Peran Serta Masyarakat

Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN berfungsi untuk pelaksanaan peran serta di lingkungan pendidikan dan pelaksanaan peran serta di lingkungan kerja dan di masyarakat.



BAB IV

METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Selanjutnya, juga dijelaskan mengenai informan, teknik pemilihan informan dan juga disertai dengan operasionalisasi faktor-faktor yang akan diteliti.

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional dan juga di diberbagai institusi yang menjadi objek pemberdayaan masyarakat dari Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional seperti PT. Sanyo Jaya Components Indonesia, Universitas Paramadina, Universitas Nasional dan juga di Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN itu sendiri. Penelitian dilaksanakan pada bulan April s.d Juni 2011.

4.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode penulisan deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan suatu fakta tentang kegiatan BNN dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba. Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan data-data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada personel Direktorat Peran Serta Masyarakat, narasumber kegiatan dan peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Penulis juga mendapatkan data-data sekunder melalui studi kepustakaan.

Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Penentuan penggunaan pendekatan kualitatif ini dilakukan berdasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: (1) data yang dikumpulkan merupakan data deskriptif, yaitu berupa kata-kata dan tindakan-tindakan subyek yang diwawancara atau diamati; (2) penelitian

ini memberikan gambaran apa adanya; (3) penelitian ini bermaksud untuk mengungkap peristiwa-peristiwa yang alami, yang tidak dapat direayasa atau dimanipulasi; dan (4) aspek-aspek yang dikaji dapat sementara peneliti berlaku sebagai instrument utama dan mendatangi sumber data secara langsung; (2) merupakan penelitian deskriptif; (3) penelitian dilakukan dengan lebih menekankan pada proses, bukan semata-mata pada outcomes atau hasil penelitian; (4) analisis data dilakukan dengan cara induktif; (5) kedekatan peneliti (dengan responden) merupakan hal yang penting dalam proses penelitian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh John W. Creswell (Patilima, 2005:65) mengemukakan bahwa ada enam asumsi dalam pendekatan kualitatif yang perlu diperhatikan peneliti, yaitu: (1) peneliti kualitatif lebih menekankan pada proses, bukan hanya pada hasil akhir atau produk penelitian; (2) peneliti kualitatif tertarik pada makna – bagaimana orang membuat hidup, pengalaman dan struktur kehidupannya masuk akal; (3) peneliti kualitatif merupakan instrument pokok untuk pengumpulan dan analisis data; (4) peneliti kualitatif melibatkan kerja lapangan; (5) penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dalam arti peneliti tertarik pada proses, makna dan pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar; dan (6) proses penelitian kualitatif bersifat induktif, peneliti membangun abstrak, konsep, proposisi, dan teori.

Pendekatan yuridis-manajerial merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, karena yang menjadi pusat penelitian utama pada penelitian ini ialah kebijakan dalam melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba, agar diperoleh gambaran seberapa jauh pengaruhnya dalam menekan kejahatan narkoba.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik dalam mengumpulkan data penelitian dapat meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara telah diakui sebagai teknik pengumpulan data atau informasi yang penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Wawancara adalah suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu dengan menggunakan format tanya jawab yang terencana. Wawancara memungkinkan analisis sistem mendengar tujuan-tujuan, perasaan, pendapat dan prosedur-prosedur informal dalam wawancara dengan para pembuat keputusan organisasional. Kelengkapan informasi. Meskipun e-mail dapat digunakan untuk Analisis sistem menggunakan wawancara untuk mengembangkan hubungan mereka dengan klien, mengobservasi tempat kerja, serta untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan menyiapkan orang yang diwawancarai dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan temuan, namun akan lebih baik bila wawancara dijalankan secara personal bukan elektronis.

2. Pengamatan / Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.

Kelémahan dari metode ini adalah peneliti tidak akan memperoleh data yang mendalam karena hanya bertindak sebagai pengamat dari luar tanpa mengetahui makna yang terkandung di dalam peristiwa.

Alat yang digunakan dalam teknik observasi ini antara lain: lembar cek list, buku catatan, kamera photo, dll

3. Studi Kepustakaan

Kepustakaan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental yang lain. Kepustakaan yang dipilih harus memiliki kredibilitas yang tinggi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari kata-kata orang-orang yang diwawancarai dan dicatat melalui perekam. Wawancara, menurut Lexy J Moleong (1991:135) dijelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu. Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

Ada beberapa jenis wawancara, yaitu; wawancara berstruktur, wawancara tidak berstruktur, wawancara secara terang-terangan, wawancara dengan menempatkan informan sebagai jawatan.

Untuk mendapatkan hasil wawancara yang optimal, sikap pewawancara juga sangat menentukan. Hal ini untuk menghindari kekeliruan akibat sikap pewawancara sebagaimana dikemukakan sebelumnya. terhadap orang-orang yang skunder. Data skunder dengan cara penelitian langsung dengan menggunakan instrument dalam bentuk wawancara. Data skunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen, laporan, buku-buku, majalah, hasil seminar, dan data mengenai kegiatan pemberdayaan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dan juga isntitusi terkait.

Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Contohnya adalah pada peneliti yang menggunakan data statistik hasil riset dari surat kabar atau majalah.

Jika data sekunder dapat kita peroleh dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia, misalnya di perpustakaan, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah; maka data primer harus secara langsung kita

ambil dari sumber aslinya, melalui nara sumber yang tepat dan yang kita jadikan responden dalam penelitian kita.

4.4 Tehnik Pemilihan Informan

Sumber data dalam tesis ini adalah kata-kata dari orang-orang yang diwawancarai (informan). Dalam penelitian kualitatif yang diwawancarai tidak harus mewakili seluruh populasi, hanya beberapa orang yang memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang obyek penelitian. Apabila menggunakan tehnik dokumentasi, sample dapat berupa bahan - bahan dokumenter, prasasti, legenda dan sebagainya (Bungin, 2001). Sehingga tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan - perbedaan yang nantinya digeneralisasikan. Tapi untuk merinci kekhususan yang ada kedalam ramuan konteks yang unik dari informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

4.5 Deskripsi Informan

Moleong (2005) menjelaskan bahwa informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, seorang informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Informan *berkewajiban* secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikannya dan dengan kesukarelaannya informan dapat *memberikan pandangan dari segi orang dalam* tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut. Informan terdiri atas: Informan Kunci (*Key Informant*), Informan Penting (*Important Informant*), dan Informan Tambahan (*Supplement Informant*).

Informan kunci ialah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan kunci yaitu Direktur Peran Serta masyarakat dan beberapa personel institusi yang menjadi obyek

pemberdayaan Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan narkotika Nasional, baik itu di lingkungan pekerjaan ataupun pendidikan.

Informan utama adalah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Kasubdit Lingkungan Kerja dan Masyarakat dibantu dengan para stafnya serta para personel institusi yang dipilih baik yang pernah mendapatkan penghargaan maupun yang belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai informan utama. Hal ini dikarenakan mereka dianggap memiliki keterlibatan yang cukup penting dalam kegiatan pemberdayaan dalam meningkatkan peran serta masyarakat..

Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Dalam penelitian ini, ada beberapa pertimbangan untuk menentukan informan sebagai sumber informasi. Dalam menentukan informannya adalah:

1. Keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh. Berdasarkan hal ini maka jumlah informan sangat tergantung pada hasil yang dikehendaki. Bila mereka yang menjadi informan adalah orang-orang yang benar-benar menguasai masalah yang diteliti, maka informasi tersebut dijadikan bahan analisis.
2. Jumlah informan sangat bergantung pada pencapaian tujuan penelitian, artinya bila masalah-masalah dalam penelitian yang diajukan sudah terjawab dari 5 informan, maka jumlah tersebut adalah jumlah yang tepat.
3. Peneliti diberi kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi informan, tidak terpengaruh jabatan seseorang. Bisa saja peneliti membuang informan yang dianggap tidak layak.

4.6 Informan

Dalam penelitian ini akan digambarkan karakteristik dari para informan, yang meliputi informan dari lingkungan pekerjaan, lingkungan pendidikan, Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dan juga narasumber BNN yang biasa memberikan materi pemberdayaan masyarakat.

4.6.1 Informan Lingkungan Pekerjaan

Informan pertama adalah Bapak Ana Dhirmasyah atau yang akrab dipanggil Bapak Ikhun. Pria asal Jawa Barat kelahiran tahun 1971 ini adalah Staff Supervisor dari PT. Sanyo Jaya Components Indonesia. Pak Ikhun sudah 15 tahun bekerja di PT. Sanyo Jaya Components Indonesia.

Informan kedua adalah Ibu Maria Dasion. Ibu yang berasal dari Larantuka, Flores ini menjabat sebagai *Human Resources Development (HRD) Manager* dari PT. Mustika Ratu. Beliau sudah 22 tahun bekerja di perusahaan tersebut.

Informan yang ketiga adalah bapak Respati Prihantono. Pria berdarah Jawa – Sunda ini mempunyai posisi sebagai Humas dari P2 K3 PT. Mustika Ratu. Beliau ini tergolong pria yang ramah, karena ketika penulis meminta waktu untuk mewawancarainya, beliau bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya di kantor yang sedang mengadakan suatu kontes penjurian.

4.6.2 Informan Lingkungan Pendidikan

Informan pertama adalah Putri Indah Bakti selaku Sekretaris Senat Universitas Paradina. Gadis kelahiran Jawa Medan ini masih berumur 22 tahun dan bertempat tinggal dengan mengkos di belakang kampus Universitas Paramadina.

Informan kedua adalah Mirna Safitri, staff dr Senat Universitas Paramadina, yang bertugas membantu kegiatan dari Sekretarisnya, Putri Indah Bakti. Gadis kelahiran tahun 1989 ini berasal dari Jawa dan juga tinggal dengan indekos di belakang kampus Universitas Paramadina.

Informan yang ketiga adalah bapak Abdul Rahman Yacob. Pria kelahiran 8 Agustus 1964 ini adalah Ketua Satgas Anti Narkotika dan Minuman Keras (Anarmuna) Universitas Nasional.

Beliau juga aktif di dalam Kepala Pusat Studi dan Bantuan Hukum Universitas Nasional.

Informan keempat adalah Fathir Ashfath. Mahasiswa tingkat tiga dari Universitas Gunadarma ini adalah Presiden dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Informan penulis ini adalah mahasiswa tingkat tiga yang mengambil Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi

4.6.3 Informan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

Informan yang pertama adalah Agus Suparja, SH. Bapak ini menjabat sebagai Kasi Lingkungan Kerja Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Pria kelahiran 26 Juni 1964 ini adalah seorang anggota POLRI dengan pangkat Inspektur Satu (IPTU).

Informan yang kedua adalah ibu Ir. Sri Haryati, M.Si. Ibu yang bertempat tinggal di daerah Cimanggis Depok ini sudah 8 tahun bekerja di BNN. Beliau mempunyai posisi sebagai Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.

Informan yang ketiga adalah Hadi Prasetyo. Pria yang bertempat tinggal di daerah Slipi ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Beliau sudah bekerja di BNN selama 6 tahun dan merupakan angkatan pertama dari penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNN.

4.6.4 Informan Narasumber Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

Informan yang satu ini mempunyai nama Yudi Kusmayadi. Pria kelahiran September 1954 ini mempunyai posisi sebagai Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung) Deputi Pencegahan. Beliau sudah 7 tahun bekerja di BNN. Beliau sering dijadikan narasumber oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN juga oleh

Deputi Pencegahan BNN untuk menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan penyuluhan ataupun pemberdayaan masyarakat.

4.7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses kegiatan pelaksanaan pemberdayaan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.

2. Reduksi.

Langkah ini dilakukan untuk melakukan coding terhadap informasi-informasi yang penting yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Pengelompokan data.

Setelah data-data dikumpulkan, kemudian dikelompokkan dan disusun dalam bentuk narasi

4. Penyajian.

Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk tabel, ataupun uraian penjelasan.

5. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan.

Dengan Semakin banyaknya informasi yang didapatkan, maka diharapkan akan menghasilkan data yang sudah tersaring dengan ketat dan lebih akurat.

4.8 Operasionalisasi Faktor-faktor Yang Akan Diteliti

Karena luasnya object yang, maka penulis membatasi diri pada beberapa faktor yang dipandang terkait erat dengan proses peran serta masyarakat. Adapun secara konseptual proses internal terdiri dari komponen-komponen input, proses, output dan feedback, dengan demikian secara operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Operasionalisasi Faktor-faktor Yang Akan Diteliti

NO	FAKTOR-FAKTOR	JENIS	SUMBER	TEKNIK PENGUMPULAN DATA
I	Internal			
	1. Organisasi			
	a. Personel (SDM)	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
	b. Narasumber	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
	c. Anggaran	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
	2. Materi			
	a. Materi yang disampaikan	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
	b. Sarana dan Prasarana	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
	c. Audience	Primer	Informan	Wawancara
	d. Fasilitas	Primer	Informan	Wawancara
3. Pelaksanaan				
a. Metode	Primer	Informan	Wawancara	
b. Waktu yang Diperlukan	Primer	Informan	Wawancara	
II	Eksternal			
	1. Lingkungan Kerja Bebas Narkoba	Primer	Informan	Wawancara
	2. Lingkungan Pendidikan Bebas Narkoba	Primer	Informan	Wawancara
	3. Situasi dan Kondisi yang Kondusif Dalam Meaksanakan Program P4GN di Lingkungan Kerja & Pendidikan	Primer	Informan	Wawancara
	4. Permasalahan dalam menciptakan Lingkungan kerja & pendidikan yang bebas Narkoba	Primer	Informan	Wawancara

Berdasarkan tabel 4.1 maka dapat disusun Pedoman Wawancara sebagai berikut :

Tabel 4.2
Pedoman Wawancara

NO	FAKTOR-FAKTOR	PERTANYAAN	INFORMAN
I	Internal		
	1. Organisasi Personel (SDM)	1. Berapakah jumlah staf di Direktorat Pemberdayaan Masyarakat? 2. Apakah jumlah staf yang ada sudah mencukupi untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan? 3. Bagaimana kualitas staf yang ada?	Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

<p>Narasumber</p>	<p>4. Apakah staf yang ada sudah sesuai dengan bidang kerja dan latar belakang pendidikannya?</p> <p>1. Berapakah jumlah narasumber yang dimiliki oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat?</p> <p>2. Bagaimana kualitas narasumber yang dimiliki oleh BNN?</p> <p>3. Apakah sudah ada SOP dalam perekrutan narasumber?</p> <p>4. Bagaimana cara rekrutmen narasumber di Deputi Pemberdayaan Masyarakat?</p> <p>5. Berapa lama seorang narasumber menyampaikan materi kepada para peserta?</p>	<p>Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN</p>
<p>Anggaran</p>	<p>1. Apakah anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan sudah mencukupi?</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi berkaitan dengan anggaran?</p>	<p>Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN</p>
<p>2. Materi Bahan atau materi yang disampaikan</p>	<p>1. Bagaimana upaya mempersiapkan materi dan bahan untuk melakukan pemberdayaan dalam meningkatkan peran serta masyarakat?</p> <p>2. Apakah ada tim khusus dalam penyiapan materi kegiatan?</p> <p>3. Apa yang menjadi dasar dalam pemilihan materi dalam kegiatan program pemberdayaan?</p> <p>4. Dalam setiap kegiatan, ada berapa materi yang disampaikan?</p>	<p>Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN</p>
<p>Sarana dan Prasarana</p>	<p>1. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat?</p> <p>2. Sarana dan prasarana apa yang dipakai untuk melakukan pemberdayaan masyarakat?</p>	<p>Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN</p>
<p>Audience</p>	<p>1. Hal apa yang mendasari dalam pemilihan audience untuk disertakan dalam kegiatan program pemberdayaan?</p> <p>2. Apakah ada permintaan dr institusi tertentu atau memang dari Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN yang memilih audiencenya?</p>	
<p>3. Pelaksanaan Metode</p>	<p>1. Metode apa saja yang dipergunakan dalam kegiatan program pemberdayaan?</p> <p>2. Apakah sudah ada SOP dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat?</p> <p>3. Apakah ada tim khusus yang bertugas dalam pemilihan metode yang akan dipakai?</p>	<p>Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN</p>
<p>Waktu yang Diperlukan</p>	<p>1. Berapa banyak waktu yang diperlukan dalam penyampaian materi?</p> <p>2. Tahapan-tahapan apa saja yang ha</p>	<p>Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN</p>

		<p>dilakukan, dan memerlukan waktu berapa lama?</p> <p>3. Berapa lama target proses pemberdayaan masyarakat selesai dilaksanakan?</p>	
II	<p>Eksternal</p> <p>Lingkungan Kerja Bebas Narkoba</p> <p>Lingkungan Pendidikan Bebas Narkoba</p> <p>Situasi dan Kondisi yang Kondusif Dalam Melaksanakan Program P4GN di Lingkungan Kerja & Pendidikan</p>	<p>1. Apakah pernah mendengar ada rekan anda yang terkena narkoba?</p> <p>2. Beranikah anda melaporkan atau mengajak rekan anda yang terkena narkoba untuk direhabilitasi?</p> <p>3. Apakah kegiatan pemberdayaan yang diikuti dapat menambah pengetahuan anda tentang narkoba?</p> <p>4. Apa yg menjadi faktor terbesar maraknya peredaran narkoba di lingkungan anda?</p> <p>5. Apa saja yang sudah dilakukan oleh institusi saudara dalam rangka mencegah adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan anda?</p> <p>1. Apakah anda mengetahui apa saja pengaruh ketergantungan narkoba dalam kegiatan belajar atau bekerja?</p> <p>2. Apakah kegiatan pemberdayaan yang anda ikuti dapat anda terapkan di lingkungan anda?</p> <p>3. Apakah sudah terbentuk satgas di lingkungan anda?</p> <p>4. Apakah anda bersedia menyalurkan informasi yang anda dapat kepada rekan-rekan anda yang lain?</p>	<p>Pihak Kampus dan Perusahaan</p> <p>Pihak Kampus dan Perusahaan</p>

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti menguraikan data dan hasil penelitian mengenai permasalahan yang telah dirumuskan di Bab I, yaitu Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional dalam meningkatkan peran serta masyarakat, yang dikaitkan dengan beberapa indikator strategi komunikasi, sehingga dapat terlihat bagaimana strategi komunikasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan.

Penulis dalam tahap ini melakukan atau membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui bagaimana Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional dalam meningkatkan peran serta masyarakat, yang dikaitkan dengan beberapa indikator strategi komunikasi, sehingga dapat terlihat bagaimana strategi komunikasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di dalam lingkungan pekerjaan dan lingkungan pendidikan yang dalam proses analisis itu sebagai berikut:

1. Menyusun daftar untuk pertanyaan wawancara berdasarkan identifikasi masalah yang akan ditanyakan kepada informan sebagai narasumber
2. Melakukan wawancara mendalam dengan para pelaksana dan peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan kegiatan Pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan satgas dalam rangka mewujudkan kampus bebas narkoba dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan kerja dan masyarakat bebas narkoba.
3. Mengikuti dan melakukan observasi partisipatif dilapangan untuk melihat secara langsung bagaimana bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional.
4. Memindahkan data penelitian yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan serta data yang didapat oleh peneliti dari penelitian.

5.1 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat BNN sebelum adanya Direktorat Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat sebelum adanya Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN (masih berada dalam PusCegah) sampai dengan masa peralihannya di pertengahan tahun 2010, hanya berada dalam taraf pemberian informasi dan pengetahuan tentang narkoba kepada masyarakat.

Setidaknya hal ini sesuai dengan pengakuan dari Bapak Drs. Yudi Kusmayadi, BS, MSPH, selaku narasumber kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah bekerja selama masih ada Puscegah :

"... Sewaktu masih berada di dalam Puscegah, kegiatan pemberdayaan masyarakat masih dalam tahap pemberian informasi, tanpa ada tindakan selanjutnya. Hal ini berbeda dengan yang sekarang, dimana sebelum diadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, diadakan suatu Rapat Koordinasi (RAKOR) dengan para calon peserta pemberdayaan masyarakat, baru kemudian dilakukan kegiatannya, selanjutnya akan dilakukan supervisi dan monitoring evaluasi untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dan juga untuk menilai kinerja dari Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN"

5.1.1 Faktor Internal Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

Faktor internal merupakan faktor penentu yang utama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian, faktor internal adalah faktor yang pertama menjadi bahan dalam penelitian, yaitu :

1) Organisasi

Di dalam organisasi ada beberapa faktor lagi yang berperan sebagai acuan dalam bahan penelitian ini. Faktor tersebut adalah :

a. SDM

Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola

dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Sumber Daya Manusia yang terdapat di dalam Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dalam segi jumlah sudah mencukupi, tetapi ada klasifikasi khusus yang masih kurang. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari ibu Ir. Sri Haryati, M.Si :

".... jumlah personel staf di Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN sudah mencukupi untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tetapi, untuk personel yang membidangi masalah keuangan, masih belum memadai dan belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga kualitasnya dianggap kurang memenuhi harapan. Hal inilah yang terkadang menjadikan kendala di dalam pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat..."

b. Narasumber

Jumlah Narasumber dijelaskan oleh Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan, Ir. Sri Haryati, M.Si:

"... jumlah narasumber yang ada di dalam Direktorat Peran Serta Masyarakat memang masih kurang sehingga sering keteteran dalam memenuhi permintaan narasumber yang diinginkan oleh masyarakat ..."

Hal ini juga diamini oleh Drs. Yudi Kusmayadi, BS, MSPH, yang memberikan pendapat :

"... kebutuhan akan narasumber BNN masih sangat besar karena narasumber yang ada sekarang masih sangat sedikit personelnnya, jauh dari ideal. Menurut beliau, idealnya adalah setiap unit adalah satu narasumber, karena seandainya ada tugas di bidang-bidang BNN (Rehabilitasi, Pencegahan, Pemberantasan, Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama) sudah bisa ditentukan siapa narasumbernya yang bertugas memberikan materi di kegiatan tersebut. Jadi, ketika ada permintaan narasumber dari kelompok manapun, sudah ada pendelegasian tugasnya masing-masing yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing ..."

Narasumber BNN belum ada yang mendapatkan pendidikan khusus tentang bagaimana cara memberikan materi pemberdayaan yang baik. Kondisi narasumber seperti itu sangat mempengaruhi kualitas pemberian materi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Kualitas narasumber dapat dilihat melalui latar belakang individunya, pendidikan, keadaan lingkungan, termasuk juga mengenai penguasaan seseorang terhadap suatu materi yang ditugaskan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Namun yang menjadi tolak ukur penilaian BNN terhadap seorang narasumber BNN pada saat ini adalah : pengetahuan, pengalaman, dan penerapan aplikasi.

Untuk standarisasi pemilihan narasumber dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dijelaskan oleh Hadi Prasetyo sebagai berikut :

“ ... tidak ada standar khusus dalam pemilihan narasumber, karena narasumber yang dipilih biasanya hanya berdasarkan materi yang akan diberikan saja..”

Karena belum ada standarisasi mengenai kualitas, kuantitas, metode, dan strategi, maka sampai saat ini masih menggunakan teori-teori yang ada saja, seperti teori komunikasi. Hal ini juga didukung dengan perkataan dari Bapak Drs. Yudi Kusmayadi, BS, MSPH,:

”... untuk penentuan narasumber belum ada Standard Operating Procedure (SOP), penentuan narasumber lebih menitikberatkan pada tupoksi dari narasumber itu sendiri ...”

Untuk waktu dalam pemberian materi, biasanya narasumber diberikan waktu oleh panitia selama 90 (sembilan puluh) menit. Hal ini pun tidak mengikat, dalam arti apabila waktu yang diberikan kurang ataupun lebih dari sembilan puluh menit, narasumber akan mengikutinya.

Dapat dilihat dari pernyataan oleh Bapak Drs. Yudi Kusmayadi, BS, MSPH,:

"... waktu yang diberikan dalam menyampaikan materi adalah 90 (sembilan puluh menit). Tetapi, apabila diberikan waktu lebih, saya akan lebih bersemangat untuk memberikan materinya. Tetapi sebaliknya, seandainya waktu yang diberikan jauh lebih sedikit, saya akan dapat menyesuaikan dengan waktu yang diberikan tersebut ..."

c. **Anggaran**

Untuk jumlah anggaran diakui masih kurang sehingga berakibat tidak dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. Terlebih lagi dengan sasaran pemberdayaan yang jauh di luar kota, karena anggaran yang dibutuhkan pun jauh lebih besar. Pernyataan ini seperti yang didengar dari Ibu Ir. Sri Haryati, M.Si :

"... jumlah anggaran dalam mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap masih kurang karena masih banyak sekali lingkungan pendidikan yang belum bisa tersentuh oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Untuk tingkat daerah dikarenakan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) belum aktif sepenuhnya, sehingga masih dilakukan pemberdayaan oleh BNN langsung ..."

2) **Materi**

a. **Materi yang disampaikan**

Dalam mengadakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat, Direktorat Perasn Serta Masyarakat melakukan persiapan materi dan bahan dengan mengadakan rapat kecil terlebih dahulu dengan narasumber BNN. Untuk kemudian disajikan secara komprehensif sesuai dengan peserta yang diikuti sertakan dalam kegiatan tersebut. Bahan untuk materi pemberdayaan masyarakat dapat diambil dari berbagai sumber, biasanya menyangkut hal-hal yang krusial dalam hal pemberian informasi dan pengetahuan tentang narkoba kepada masyarakat. Materi dan bahan dalam mempersiapkan penyuluhan, adalah memberikan informasi tentang situasi global supaya masyarakat bisa mengetahui tentang narkoba dan dampak dari penyalahgunaan

narkoba, sehingga mereka mengetahui bahwa narkoba berbahaya dan merupakan musuh bersama yang harus diberantas. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Ir. Sri Haryati, M.Si :

"... Untuk pemilihan materi yang akan dipakai dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat, materi ditentukan oleh panitia dalam Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, dan barulah kemudian diberikan kepada narasumber untuk dijadikan bahan pemberdayaan oleh mereka ..."

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain adalah *laptop*, *LCD Projector*, materi presentasi dan juga didukung dengan perangkat audio video.

Adanya perbedaan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, mempengaruhi perbedaan sarana dan prasarana. Hal tersebut tergantung dari latar belakang *audience*, karena kalau peserta berasal dari latar belakang lingkungan pendidikan, tentu akan berbeda dengan peserta yang memiliki latar belakang dari lingkungan pekerjaan.

Peralatan yang disiapkan untuk suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya satu buah, melainkan beberapa. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi kerusakan atau kesalahan pada salah satu alat. Termasuk di dalamnya adalah tenaga operator peralatan tersebut, beberapa operator dipersiapkan guna meminimalisir *human error* dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Drs. Yudi Kusmayadi, BS, MSPH,:

"... salah satu alat bantu standar adalah peralatan IT, seperti laptop dan lcd projector. Dan juga terkadang alat-alat bantu lain dipergunakan untuk membuat agar pemberian materi tersebut dapat diserap dengan baik ..."

c. Audience (Peserta)

Dalam menentukan peserta yang akan diikuti sertakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, tidak ada kriteria khusus yang menjadi patokan dasar. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh Bapak Agus Suparja, SH :

"...tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan peserta program pemberdayaan tersebut, karena yang diundang adalah seluruh perusahaan yang ada, dan akhirnya yang mengikuti kegiatan tersebut adalah instansi-instansi yang mempunyai komitmen dan keinginan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya ..."

Tetapi, ternyata pendapat berbeda disampaikan oleh Ibu Ir. Sri Haryati, M.Si :

"... peserta yang akan diikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat BNN, dipilih dari kampus-kampus yang rawan dengan penyalahgunaan narkoba dan dari beberapa kampus yang sudah melakukan MOU dengan BNN ..."

3) Pelaksanaan

a. Metode

Dalam memberikan materi pemberdayaan masyarakat, setiap narasumber memiliki metodenya masing-masing. Ada metode khusus yang dirancang oleh narasumber kita, Bapak Drs. Yudi Kusmayadi, BS, MSPH, yaitu metode edukatif preventif dan *edutainment*, menggabungkan antara penyampaian materi dan hiburan. Hiburan dalam hal ini bukan berarti dengan adanya musik, atau pertunjukan lain, melainkan dengan variasi bicara, bagaimana cara membuat orang tertawa, sehingga dalam memberikan materi dapat memancing minat peserta untuk serius mendengarkan dan menghilangkan kejenuhan dari pesertanya sendiri

b. Waktu

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, biasanya memerlukan waktu 2 (dua) hari. Dan proses

pemberdayaan yang dilaksanakan melingkupi beberapa tahapan, antara lain adalah melakukan penyusunan dokumen perencanaan, mengirimkan surat undangan, mengumpulkan mereka untuk (Rakor) Rapat Koordinasi, kemudian barulah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakatnya, selanjutnya menunggu tindak lanjut dari para peserta kegiatan tersebut dan kemudian akan dilaksanakan supervisi dan monitoring evaluasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Agus Suparja, SH :

"... Hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan, mengirimkan surat undangan dan mengumpulkan mereka untuk rapat koordinasi, kemudian melakukan kegiatan program pemberdayaannya. Setelah dilaksanakan kegiatan program pemberdayaan, kemudian dilakukan supervisi dan yang terakhir adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev) ..."

5.1.2 Faktor Eksternal Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

Faktor eksternal merupakan faktor penunjang dalam berhasilnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN. Ada beberapa faktor eksternal yang diteliti, antara lain :

1. Lingkungan Kerja / Pendidikan Bebas Narkoba

Salah satu faktor terbesar dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah lingkungan tempat orang itu berada. Salah satunya adalah di lingkungan kerja dan di lingkungan pendidikan, dalam hal ini lingkungan kampus. Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, dicoba untuk menggali beberapa informasi, antara lain :

a. Rekan mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

Dari beberapa informasi yang didapat dari informan, ada beberapa dari rekan mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Dan mereka bersedia melaporkan rekannya tersebut untuk direhabilitasi di tempat-tempat yang sudah ditunjuk oleh instansi yang berwenang. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Ana

Dhirmansyah atau yang akrab dipanggil dengan bapak Ikhun yang merupakan Staff Supervisor pada PT. Sanyo Jaya Components Indonesia :

"... saya dengan tegas mengatakan akan berani melaporkan mereka karena hal ini berhubungan juga dengan nama baik perusahaan ..."

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Fathir Ashfath, Mahasiswa tingkat tiga dari Universitas Gunadarma yang merupakan Presiden dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma :

"... Saya bersedia akan melaporkan rekan tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan rehabilitasi ..."

b. Kegiatan yang sudah mereka ikuti.

Seluruh peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BNN mengakui bahwa banyak sekali manfaat yang mereka dapatkan dari acara tersebut. Dan mereka mendukung sekali dengan diadakannya acara tersebut karena dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang narkoba sehingga mereka dapat mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara untuk menanggulangnya. Mereka juga berharap bahwa acara yang sudah dilaksanakan tersebut dapat sering-sering dilakukan sehingga, akan semakin banyak masyarakat yang memperoleh informasi berharga tersebut. Hal ini didukung oleh Respati Prihantono. B, yang mempunyai posisi sebagai Humas dari P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) PT. Mustika Ratu :

"... materi yang disampaikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN sangat bermanfaat, untuk dirinya sebagai individu, juga untuk perusahaan tempat saya bekerja. Dan dengan adanya kegiatan tersebut, Saya jadi lebih mengenal apa itu narkoba, narkotika, prekursor, dll.

Hal senada juga diungkapkan oleh Putri Indah Bekti, Mahasiswi berumur 22 tahun yang mempunyai jabatan sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa Universitas Paramadina Jakarta :

"... kegiatan yang dilaksanakan tersebut cukup signifikan karena memberikan masukan-masukan kepada mahasiswa, selain itu juga memberikan ide-ide baru bagi mahasiswa untuk menggabungkan ide yang sama dalam hal pemberantasan narkoba di lingkungan kampus. Dari acara tersebut, ilmu yang diberikan oleh para narasumber juga memberikan masukan-masukan pengetahuan yang lebih luas tentang narkoba itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk dapat menjauhinya ..."

Pendapat Fathir juga mendukung penuh terselenggaranya kegiatan tersebut :

"... materi yang diberikan oleh narasumber, menurut dia cukup relevan dan narasumbernya cukup ahli di bidangnya. Dijelaskan pula dengan adanya kegiatan tersebut, dapat menambah pengetahuannya tentang bahaya, cara pencegahan, dan perundang-undangan tentang narkoba. Dan diapun bersedia untuk memberikan informasi yang didapat untuk disampaikan kepada teman-temannya yang lain ..."

c. Hal-hal yang sudah dilakukan oleh institusi peserta.

Dari terselenggaranya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh BNN, diharapkan institusi peserta dari kegiatan tersebut akan melakukan suatu aksi sebagai bentuk komitmen mereka untuk melakukan sesuatu bagi lingkungannya masing-masing. Ada beberapa hal yang sudah mereka lakukan, antara lain seperti yang diungkapkan oleh ibu Maria Dasion, yang menjabat sebagai *Human Resources Development (HRD) Manager* dari PT. Mustika Ratu :

"... tanggal 1 Juli nanti akan diadakan sosialisasi tentang narkoba, dimana pesertanya nanti adalah karyawan dari PT. Mustika Ratu, dan yang akan diundang sebagai narasumber adalah Pak Joko, yang merupakan narasumber dari BNN juga ..."

Institusi lain yang juga akan melakukan sesuatu adalah Universitas Paramadina Jakarta, sesuai dengan informasi yang didapat dari Mirna Safitri, yang merupakan Staff Senat Mahasiswa Universitas Paramadina Jakarta :

"... kami akan melakukan penyuluhan kepada remaja-remaja di daerah lingkungan pinggiran. Yang menjadi target utamanya adalah anak-anak jalanan yang sering menyalahgunakan narkoba dengan menghirup lem. Lima personel yang akan menjadi pelopor pembentukan satgas tersebut, sudah melakukan kunjungan dan berkoordinasi dengan ibu PKK dari lingkungan yang akan dilakukan penyuluhan. Dan ternyata pihak dari ibu-ibu PKK tersebut sangat antusias menerima maksud dari kunjungan mereka, dan bersedia memberikan tempat dan membantu segala hal yang akan diperlukan dalam kegiatan penyuluhan tersebut ..."

2. Situasi dan Kondisi yang Kondusif Dalam Melaksanakan Program P4GN di Lingkungan Kerja & Pendidikan.

Situasi dan kondisi dari lingkungan dapat mempengaruhi kinerja dari pekerjaan dan pendidikan di kampus. Para peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah memahami benar akan hal itu. Ini sejalan dengan pengakuan dari informan kami, Fathir :

"... dampak dari penyalahgunaan narkoba akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas dari mahasiswa tersebut ..."

5.2 Pemberdayaan Masyarakat

Langkah selanjutnya yang dilakukan setelah munculnya kesadaran masyarakat bahwa narkoba adalah musuh bersama dan merupakan masalah publik adalah menampung aspirasi keinginan warga untuk berperanserta dalam mengentaskan masalah tersebut dari lingkungan mereka dalam suatu satgas di lingkungannya masing-masing. Satgas ini bertujuan agar aktifitas masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba lebih terarah dan terfokus melalui perencanaan yang matang sehingga didapatkan hasil yang optimal, efektif dan efisien.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks perubahan atas permasalahan kesehatan dan sosial menjadi titik strategis yang harus mendapat perhatian lebih seksama. Keberhasilan mencapai titik perubahan akan sangat ditentukan oleh pekerjaan pemberdayaan masyarakat. Tanpa pemberdayaan masyarakat yang memadai, kuat, dan sistematis, lingkungan hanya akan dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan yang sangat mungkin tidak bersesuaian dengan kepentingan lingkungan itu sendiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan maksud untuk memberdayakan masyarakat di lingkungannya sehingga mereka mampu mengenali persoalan-persoalan yang ada dan dapat mencari jalan keluar atau cara untuk mengatasi masalah tersebut.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya untuk membentuk suatu satgas saja, melainkan juga merupakan suatu proses peningkatan kemampuan masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa umumnya masyarakat berada pada posisi yang lemah, untuk itu diperlukan wadah perlindungan dan meningkatkan posisi tawar. Hal ini terutama berlaku bagi para penyalahguna narkoba, dimana posisinya sebagai korban peredaran gelap narkoba sangat dilemahkan, dan mereka sendiri tidak memiliki daya upaya melepaskan ketergantungan sendirian tanpa bantuan orang lain.

Namun demikian, meskipun telah muncul kesadaran baru dan telah adanya peningkatan pengetahuan masyarakat dalam lingkungan tersebut, tidak serta merta mempermudah proses pemberdayaan masyarakat di lingkungannya, terlebih lagi dalam melakukan advokasi penanggulangan narkoba secara mandiri. Hal ini diakui para peserta masih membutuhkan waktu yang agak lama. Karena pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di PT. Sanyo Jaya Components masih belum menyentuh dari pihak manajemen pembuat keputusan, dalam hal ini para WNA Jepang. Hal ini sesuai dengan informasi dari Bapak Ikhun :

"... Yang disayangkan adalah pada saat kegiatan tersebut tidak ikutnya pihak manajemen perusahaan yang berasal dari Jepang langsung. Karena mereka itulah yang berwenang di dalam peraturan-peraturan yang

berlaku di perusahaan. Hal itulah yang menjadi kendala karena untuk tindak lanjut dari program kegiatan tersebut belum dapat terlaksana ...”

5.2.1 Standard Operating Procedure (SOP) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan memang belum memiliki SOP sehingga tidak adanya satu set pedoman dalam suatu prosedur kegiatan rutin, tata cara atau langkah – langkah yang harus diikuti dalam suatu proses kerja tertentu dan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.

Penjelasan mengenai SOP ini dijelaskan oleh Drs. Yudi Kusmayadi, BS, MSPH sebagai berikut :

”... untuk ke depan adalah, BNN dalam hal ini harus memiliki pedoman dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat digunakan oleh siapa saja. Sebaiknya orang BNN diharapkan mampu memberikan informasi tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Hal inilah yang harus diupayakan untuk dibentuk, jangan seperti yang sekarang, yang memiliki prinsip the show must go on, apapun yang terjadi, kegiatan program pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan ...”

5.2.2 Efektivitas dari Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Dapat dilihat bahwa yang menjadi sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan adalah perwujudan aksi institusi peserta, dari sebelum mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sesudah mendapatkan pemberian materi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Serta dilihat juga sikap dari institusi peserta untuk berkomitmen menolak penyalahgunaan narkoba.

Tingkat keefektivan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakn belum dapat begitu saja dilihat. Karena saat penelitian ini ditulis, masih banyak tahapan dari kegiatan

Direktorat Peran Serta Masyarakat yang masih harus dilakukan. Kegiatan itu antara lain adalah supervisi dan monitoring evaluasi.

5.2.3 Tingkat Keberhasilan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, adalah memberikan materi tentang permasalahan narkoba serta dampak dari penyalahgunaan narkoba. Sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada peserta, dan kemudian menunggu komitmen institusi tersebut untuk membentuk satgas dan melakukan sesuatu sebagai aksi dari kegiatan narkoba, serta menularkan informasi tentang bahaya narkoba kepada orang lain, sehingga semakin banyak orang yang mengerti dan paham mengenai bahaya narkoba, diharapkan prevalensi pecandu pun dengan sendirinya akan turun.

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat telah berhasil, dapat dilakukan dengan monitoring dan evaluasi (monev). Namun sampai saat ini, monev tersebut belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan agenda dari program kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN masih dalam taraf kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengumpulkan para peserta dari institusi-institusi tertentu dan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang narkoba kepada mereka.

Evaluasi mengenai keberhasilan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dengan dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh satgas hasil bentukan institusi-institusi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BNN. Bapak Agus Suparja, SH, dalam wawancara mengatakan bahwa dengan adanya supervisi dan monev, akan diketahui karakter dari masing-masing instansi tersebut, sejauh mana mereka menindaklanjuti komitmen yang sudah mereka buat. Kata beliau lebih lanjut :

"...Tujuan dari diadakannya supervisi serta monitoring dan evaluasi tersebut adalah akan diketahui karakter dari masing-masing instansi tersebut, sejauh mana mereka menindaklanjuti komitmen yang sudah mereka buat dan diharapkan mereka sudah membentuk satgas di masing-masing instansi. Instansi-instansi tersebut nantinya akan kembali dikumpulkan oleh BNN untuk dievaluasi bagaimana proses pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh mereka ..."

5.3 ANALISA HASIL PENELITIAN

Selama masyarakat memandang tugas untuk menanggulangi bahaya narkoba sebagai tugas pemerintah semata, selama itu pula bahaya narkoba tidak akan pernah dapat ditanggulangi. Adalah benar dan tidak susah mendapatkan bukti empiriknya. Padahal partisipasi dan prakarsa masyarakat dalam perang melawan bahaya narkoba merupakan kunci keberhasilan dalam penanggulangan narkoba. Itu sebabnya, berapa pun besarnya dana dan daya yang dikerahkan pemerintah untuk memerangi bahaya narkoba, tidak akan berhasil tanpa berbagi tanggung jawab dengan masyarakat.

Upaya pemerintah memerangi bahaya narkoba harus mencakup:

1. Upaya pemberdayaan masyarakat untuk melawan bahaya narkoba di lingkungannya secara mandiri dengan pemberian informasi dan penyadaran tentang bahaya narkoba dan ancamannya terhadap masyarakat.
2. Pengetahuan dan keterampilan tentang cara-cara menduga situasi dan faktor-faktor permasalahan narkoba. Penyuluhan dan pendidikan pencegahan penyalahgunaan narkoba.
3. Perawatan penyalahgunaan narkoba.

Secara sederhana, rumusan pemberdayaan adalah meningkatkan power (daya, kekuasaan) mereka yang tidak berdaya atau tidak beruntung. Dua kata penting dalam rumusan tersebut adalah power, (daya, kekuasaan) dan

5.3.1 Faktor Pendukung Berhasilnya Program Pemberdayaan Masyarakat

Ada beberapa faktor pendukung yang dapat diupayakan agar kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berhasil dengan baik, adalah :

- a. Penambahan narasumber yang menguasai materi sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Materi yang sesuai dengan latar belakang peserta.
- c. Sarana dan prasarana yang mendukung.
- d. Adanya anggaran dana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan.
- e. Adanya SOP dalam perekrutan narasumber dan SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Faktor-faktor ini diperkuat oleh pernyataan dari Drs. Yudi Kusmayadi, BS, MSPH :

"... belum ada standar khusus dalam penentuan narasumber yang akan memberikan materi pemberdayaan masyarakat. Pemilihan narasumber lebih ditujukan kepada personal yang menguasai sesuatu permasalahan. Ketika seseorang menguasai sesuatu permasalahan, kemudian dialah yang akan ditunjuk untuk menjadi narasumber di suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan..."

Ditambahkan lagi oleh beliau :

"materi untuk peran serta adalah materi yang khusus karena syarat yang pertama adalah harus ada orang atau peserta yang siap dan mempunyai komitmen untuk melakukan sesuatu setelah dilakukan pembekalan dalam kegiatan pemberdayaan. Para peserta pemberdayaan lebih difokuskan kepada aksi selanjutnya setelah kegiatan pemberdayaan tersebut. Dalam menyajikan sebuah materi, diupayakan bagaimana materi tersebut dapat diserap dengan baik oleh para peserta, salah satu alat bantu standar adalah peralatan IT, seperti laptop dan lcd projector. Dan juga terkadang alat-alat bantu lain dipergunakan untuk membuat agar pemberian materi tersebut dapat diserap dengan baik..."

Sedangkan menurut Ir. Sri Haryati, M.Si, yang menjadi faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat :

“... jumlah anggaran dalam mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap masih kurang karena masih banyak sekali lingkungan pendidikan yang belum bisa tersentuh oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Untuk tingkat daerah dikarenakan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) belum aktif sepenuhnya, sehingga masih dilakukan pemberdayaan oleh BNN langsung ...”

Selain beberapa faktor diatas, ada faktor lain yang juga berperan penting terhadap institusi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menerima, memahami, menerapkan dan kemudian melaksanakan kegiatan dari materi yang telah diterima dengan baik dengan didukung penuh oleh individu sebagai bagian dari institusi tersebut, seperti berikut :

1. Dukungan penuh institusi peserta kegiatan dimulai dari Top Level Management untuk memerangi penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungannya.
2. Pertahanan diri sendiri dengan pengetahuan yang cukup tentang bahayanya narkoba dan dampak akibat penyalahgunaan narkoba.
3. Lingkungan yang baik, hal ini akan mendukung seseorang untuk dapat menghindari segala hal yang buruk yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba.
4. Adanya informasi yang tepat dan lengkap mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, serta berbagai dampak buruk akibat dari penyalahgunaan narkoba.

5.3.2 Faktor Penghambat Bagi Berhasilnya Program Pemberdayaan Masyarakat

Dengan segala keterbatasannya, elemen masyarakat tersebut masih perlu bimbingan dan bantuan dari BNN untuk

berusaha mandiri dan melakukan segala kegiatannya secara. Hal dibawah ini adalah beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat berhasilnya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, yaitu :

1. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, di beberapa institusi pekerjaan ada yang belum menyentuh kepada level top manajemen sebagai pembuat keputusan.
2. Dalam pemberdayaan masyarakat di lingkungan kampus, sebaiknya yang diutamakan adalah mahasiswa baru, karena beberapa mahasiswa yang sudah memasuki tingkat akhir, lebih memikirkan bagaimana mereka dapat menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Juga diharapkan menyentuh lingkungan di sekitar kampus, karena banyak sekali pusat-pusat kegiatan mahasiswa yang juga berada di sekitar kampus, seperti tempat kost dan warung-warung makanan.
3. Dana yang terbatas dari Direktorat Peran Serta Masyarakat masih terbatas, hal ini menyebabkan hanya sebagian kecil saja dari unsur masyarakat yang dapat terjangkau oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN.
4. Kurangnya jumlah narasumber yang dimiliki oleh BNN, sehingga membatasi gerak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.
5. Tidak adanya Standard Operating Procedure (SOP) dalam perekrutan narasumber dan juga tidak adanya SOP dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
6. Belum dimulainya kegiatan supervisi dan monitoring evaluasi sehingga belum bisa diketahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan program yang sudah dilaksanakan.

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan yang dapat dihasilkan dari penelitian ini. Disamping itu juga pada bagian akhir akan diuraikan mengenai saran-saran dari peneliti.

6.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis, maka didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN saat ini dalam meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba

Dari bab sebelumnya dapat kita lihat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dapat disimpulkan belum efektif.

Hal ini disebabkan karena kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN masih dalam tahap pemberian informasi dan pengenalan tentang narkoba. BNN masih menunggu institusi peserta pemberdayaan masyarakat tersebut membuat suatu satgas, dan satgas tersebut nantinya akan membuat suatu kegiatan yang berhubungan dengan pemberian informasi dan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkoba dan dampak buruknya.

Masih ditunggu juga kegiatan lanjutan dari BNN seperti supervisi dan monitoring evaluasi.

2. Kendala eksternal maupun internal yang dihadapi oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat terhadap bahaya narkoba.

Beberapa kendala yang dihadapi oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, antara lain adalah :

A. Kendala Internal :

- a. Masih kekurangan tenaga narasumber, hal ini sangat mempengaruhi jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan.
- b. Belum adanya SOP dalam perekrutan narasumber dan SOP dalam melaksanakan kegiatan. Karena SOP (Standard Operating Procedure) merupakan satu set pedoman dalam suatu organisasi yang menjelaskan prosedur kegiatan rutin, tata cara atau langkah – langkah yang harus diikuti dalam suatu proses kerja tertentu dan sangat dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.
- c. Masih kekurangan anggaran karena luasnya lingkungan yang harus disentuh oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat.

B. Kendala Eksternal :

- a. Masih tergantung dari inisiatif institusi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena BNN tidak mempunyai hak untuk mengintervensi institusi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Masih memerlukan waktu untuk menunggu beberapa institusi peserta kegiatan tersebut membentuk satgas dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat secara mandiri.
- c. Institusi peserta kegiatan tersebut juga terkendala oleh dana untuk melaksanakan kegiatan, karena dalam hal ini BNN tidak dapat memberikan bantuan dana.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini diajukan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Segera dilaksanakan program supervisi dan monitoring evaluasi sehingga dapat diketahui komitmen dan perkembangan dari institusi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan sebelumnya.
2. Perlu segera dibuat SOP dalam perekrutan narasumber agar dapat merekrut narasumber baru sehingga permasalahan akibat kekurangan tenaga narasumber dapat segera teratasi.
3. Perlu segera dibuat SOP dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar ada acuan kerja yang dapat dijadikan standar dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik, cepat, tepat, efektif & efisien.
4. Perlunya komunikasi yang intensif dengan institusi yang telah menjadi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat agar bisa diketahui sampai sejauh mana kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh institusi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J, Dr. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Dirjen POM Depkes RI. (1999/2000). *Pedoman Penyebarluasan Informasi Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, Buku Pegangan Bagi Tenaga Kesehatan*, Jakarta.
- Moleong, lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Jakarta : Rosda Karya
- BNN. 2009. Jurnal Data P4GN 2009
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- BNN. 2010. *Hasil Penelitian penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkoba pada Kelompok Rumah Tangga Tahun 2010*. Jakarta.
- H.Hadiman. 2010. *Kejahatan Madat Merupakan Ancaman Bagi Keberadaan Bangsa Indonesia*. Bahan Kuliah Pasca Sarjana UI. Jakarta
- Mulyana, Deddy, Dr., MA. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhyadi, DR., (1989). *Organisasi: Teori, Struktur dan Proses*, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Nurdin, Adnil Edwin, Dr., dr., SpKJ. (2007). *Madat: Sejarah, Dampak Klinis dan Penanggulangannya*, Semarang: Mutiara Wacana.
- Rudkin, Jeniffer Kofkin. (2003). *Community Psychology : Guiding Principles and Orienting Concepts*. New Jersey : Prentice Hall.
- Scott, William G. (1989). *Organization Theory: An Overview and Appraisal; Management and Organizational Behavioral Classic*. Matterson & Ivancevich (editor), Homewood Illinois: BPI/IRWIN.
- Setyonegoro, RK. (1985). *Penyalahgunaan Zat/Substansi Sebagai Manifestasi Gangguan Jiwa*. Jakarta: Depkes.

- Shortell SM dan Kaluzny MD. (1994). *Health Care Management Organizational Design and Behaviour*, 3th edition, New York: Delmar Public.
- Siswanto, B. (1987). *Manajemen Tenaga Kerja*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. (2007). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswo Sudarmo, M i, M Tasrif A.i. Pabeta, Eni Pujiastuti, E.Aminullah dan S.Dolant, (1995). *Analisis Lingkungan Hidup dengan Dinamika Sistem*. PP-PSL, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi-Diknas.
- Soelaiman, Kholil. (2006). *Komunikasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: BNN.
- Steers, Richard M. (1984). *Introduction to Organizational Behavior*. Glenview Illinois: Scott, Forestman and Company.
- Stephen P. Robbins. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain & Aplikasi* (Alih bahasa: Jusuf Udaya). Jakarta: Arcan.
- Supriatna, Tjahya, Prof. Dr. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sztompka, Piotr, (1998). *Mistrusting Civility: Predicament of a Post-Communist Society*, dalam Jeffrey C. Alexander (ed.), *Real Civil Societies, Dilemmas of Institutionalization*, London: Sage Publication.
- Tan, Jo Hann, Roem Topatimasang, (2003). *Mengorganisir Rakyat, Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*, Yogyakarta: SEAPCP, REaD.
- Wilbert E. Moore, *Order and Change*. (1967). dalam Robert MZ. Lawang, (2000). *Sosiologi 1: Pengantar Matrikulasi S-2 Sosiologi Pascasarjana FISIP UI*.
- Winardi, J., Prof., DR., (2003). *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Yayat Hayati Djatmiko. (2004). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV Alfabeta.
- Yuwono P. (1990). *Penyusunan Model & Pengolahan Data dalam penelitian Unit*

Lampiran 1 : Pedoman Pertanyaan Untuk Lingkungan Kerja

PERTANYAAN UNTUK PESERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT BNN

1. Nama ?
2. Usia / Tanggal lahir ?
3. Tempat tinggal?
4. Berapa putra / putri nya?
5. Berapa lama bekerja di perusahaan tersebut?
6. Apakah jabatan anda di perusahaan?
7. Apakah di perusahaan anda ada peraturan khusus tentang penyalahgunaan narkoba?
8. Apakah pernah ada terjadi kasus penyalahgunaan narkoba di perusahaan tempat anda bekerja?
9. Kalau sudah pernah terjadi, tindakan apa yang dilakukan dalam menindak pegawai tersebut?
10. Apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja?
11. Apakah pihak manajemen perusahaan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BNN?
12. Apa saja dukungan yang diberikan oleh perusahaan dalam menyikapi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN?
13. Apakah ada kesepakatan bersama antara manajemen perusahaan dengan serikat pekerja di perusahaan anda?
14. Apakah di perusahaan anda sudah ada satgas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba?
15. Apakah di perusahaan tempat anda bekerja sudah ada kebijakan tentang pemeriksaan urine?
16. Apakah ada saudara atau teman anda yang menjadi penyalahguna narkoba?

17. Apakah anda mengetahui pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi kinerja pegawai?
18. Berenikah anda melaporkan saudara atau teman anda yang menjadi penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi?
19. Menurut anda, apakah yang menjadi faktor terbesar maraknya peredaran narkoba di lingkungan sekitar anda?
20. Bagaimana pendapat anda tentang kegiatan yang dilaksanakan BNN tersebut?
21. Bagaimana materi yang disampaikan oleh para narasumber?
22. Apakah ada informasi yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut?
23. Apakah materi yang disampaikan narasumber memberikan informasi yang cukup tentang narkoba dan bahayanya?
24. Apakah anda bersedia memberikan informasi yang anda dapat kepada rekan-rekan yang lain?
25. Dari informasi yang anda dapat, apakah anda tahu hal-hal apa yang anda harus lakukan ketika menemukan penyalahgunaan narkoba?
26. Setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN, bersediakah anda berbuat sesuatu untuk mendukung program tersebut?
27. Seberapa perlu kegiatan ini dilaksanakan bagi lingkungan anda?
28. Apakah perlu ditingkatkan lagi kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh BNN?
29. Kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan nantinya?

Lampiran 2 : Pedoman Pertanyaan Untuk Lingkungan Pendidikan

PERTANYAAN UNTUK PESERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT BNN

1. Nama ?
2. Usia / Tanggal lahir ?
3. Tempat tinggal?
4. Berapa putra / putri nya (manajemen kampus)?
5. Anak ke, dari berapa bersaudara (mahasiswa/i)?
6. Jurusan apa, Fakultas apa (mahasiswa/i)?
7. Angkatan berapa (mahasiswa/i)?
8. Berapa lama bekerja di kampus (manajemen)?
9. Apakah jabatan anda di kampus?
10. Apakah di kampus anda ada peraturan khusus tentang penyalahgunaan narkoba?
11. Apakah pernah ada terjadi kasus penyalahgunaan narkoba di perusahaan kampus anda?
12. Kalau sudah pernah terjadi, tindakan apa yang dilakukan dalam menindak?
13. Apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh kampus untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan?
14. Apakah pihak manajemen kampus mendukung tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BNN?
15. Apa saja dukungan yang diberikan oleh kampus dalam menyikapi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN?
16. Apakah di kampus anda sudah ada satgas yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba?
17. Apakah di kampus sudah ada kebijakan tentang pemeriksaan urine?
18. Apakah ada saudara atau teman anda yang menjadi penyalahguna narkoba?
19. Apakah anda mengetahui pengaruh penyalahgunaan narkoba bagi kinerja staf / mahasiswa?

20. Beranikah anda melaporkan saudara atau teman anda yang menjadi penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi?
21. Menurut anda, apakah yang menjadi faktor terbesar maraknya peredaran narkoba di lingkungan sekitar anda?
22. Bagaimana pendapatnya tentang kegiatan yang dilaksanakan BNN tersebut?
23. Bagaimana materi yang disampaikan oleh para narasumber?
24. Apakah ada informasi yang bisa anda dapatkan setelah mengikuti kegiatan tersebut?
25. Apakah materi yang disampaikan narasumber memberikan informasi yang cukup tentang narkoba dan bahayanya?
26. Apakah anda bersedia memberikan informasi yang anda dapat kepada rekan-rekan yang lain?
27. Dari informasi yang anda dapat, apakah anda tahu hal-hal apa yang anda harus lakukan ketika menemukan penyalahgunaan narkoba?
28. Setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN, bersediakah anda berbuat sesuatu untuk mendukung program tersebut?
29. Seberapa perlu kegiatan ini dilaksanakan bagi lingkungan anda?
30. Apakah perlu ditingkatkan lagi kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan oleh BNN?
31. Kegiatan apa yang sebaiknya dilakukan nantinya?

Lampiran 3 : Pedoman Pertanyaan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

PERTANYAAN UNTUK PERSONEL DIREKTORAT PERAN SERTA MASAYARAKAT BNN

1. Nama ?
2. Usia / Tanggal lahir ?
3. Tempat tinggal?
4. Berapa putra / putri nya?
5. Berapa lama bekerja di BNN?
6. Apakah jabatan anda di BNN?
7. Apakah jumlah personel yang ada dirasa cukup dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat?
8. Apakah kualitas personel yang ada sudah memadai?
9. Apakah personel yang ada sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya?
10. Apakah jumlah anggaran yang ada dirasa cukup dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat?
11. Bagaimana menentukan peserta yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat?
12. Apakah ada SOP dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat?
13. Apakah ada kriteria khusus dalam menentukan peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat?
14. Apakah ada kriteria khusus dalam menentukan lokasi kegiatan pemberdayaan masyarakat?
15. Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk menentukan lokasi dan peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat?
16. Apakah ada permintaan dari instansi tertentu untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN?
17. Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk menentukan materi yang akan disampaikan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat?

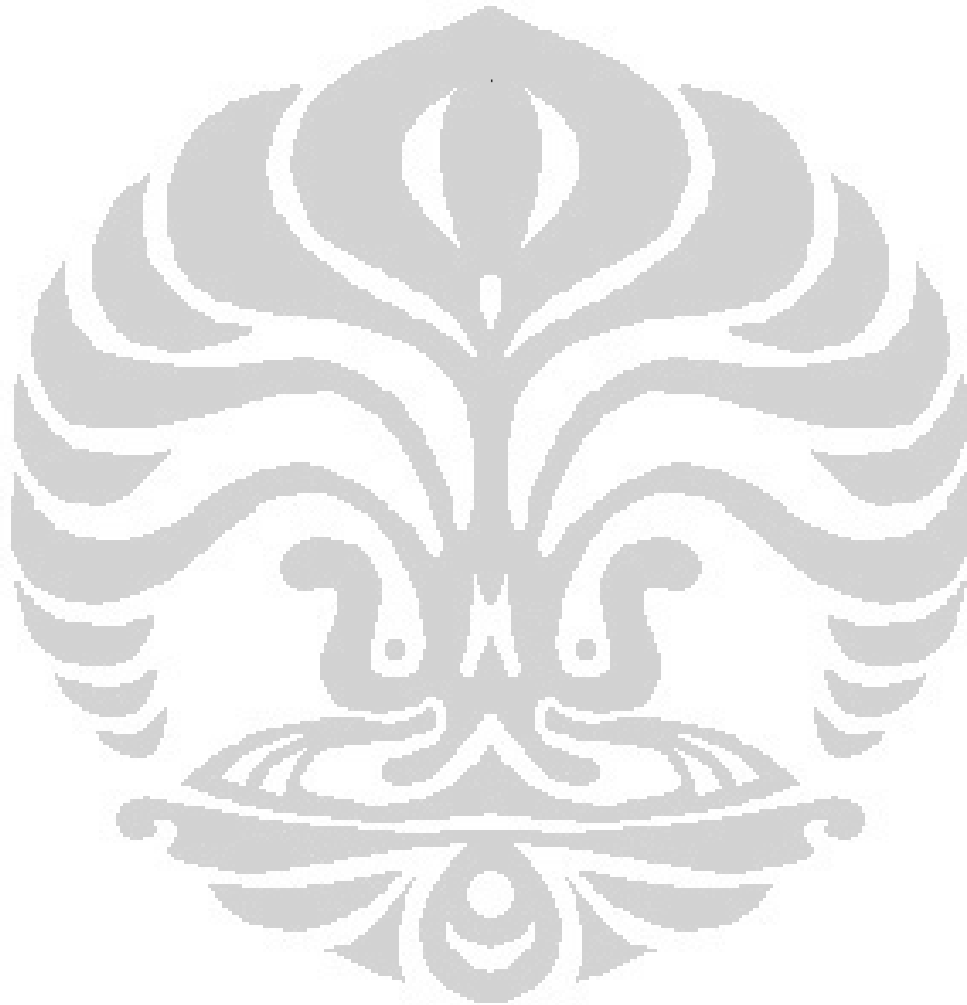
18. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan materi yang akan diberikan oleh narasumber?
19. Apakah ada tim khusus yang dibentuk untuk menentukan narasumber yang akan mengisi kegiatan pemberdayaan masyarakat?
20. Dari mana kah penentuan narasumbernya?
21. Apakah ada standarisasi khusus (SOP) dalam penentuan narasumber?
22. Bagaimana cara rekrutmen narasumbernya?
23. Berapa lama seorang narasumber diberi waktu memberikan materi?
24. Bagaimana koordinasi dengan narasumber ketika akan melakukan kegiatan program pemberdayaan masyarakat?
25. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat?
26. Metode apa saja yang digunakan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN?
27. Apakah ada tim khusus yang bertugas dalam menentukan metode pemberdayaan masyarakat yang akan dipergunakan?

Lampiran 4 : Pedoman Pertanyaan Narasumber

PERTANYAAN UNTUK NARASUMBER DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT BNN

1. Nama ?
2. Usia / Tanggal lahir ?
3. Tempat tinggal?
4. Berapa putra / putri nya?
5. Berapa lama bekerja di BNN?
6. Apakah jabatan anda di BNN?
7. Apakah kualitas anggota tim yang ada sudah memadai?
8. Apakah anggota tim yang ada sudah sesuai dengan latar belakang pendidikannya?
9. Berapa lama anda biasanya diberikan waktu untuk menyiapkan materi?
10. Apakah ada tim khusus dalam mempersiapkan materi yang akan diberikan pada saat program kegiatan pemberdayaan masyarakat?
11. Apakah ada peralatan khusus yang anda perlukan ketika memberikan materi di dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat?
12. Apakah ada permintaan secara personal dari instansi tertentu untuk memberikan materi pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh instansi tersebut?
13. Apa yang menjadi dasar dalam menentukan materi yang akan diberikan?
14. Apakah jumlah narasumber yang ada sudah mencukupi?
15. Apakah ada SOP untuk menjadi narasumber BNN?
16. Apakah ada SOP dalam memberikan materi pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat?
17. Berapa lama diberi waktu dalam memberikan materi?
18. Bagaimana koordinasi dengan personel Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN ketika akan melakukan kegiatan program pemberdayaan masyarakat?

19. Metode apa saja yang digunakan dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN?
20. Apakah ada tim khusus yang bertugas dalam menentukan metode pemberdayaan masyarakat yang akan dipergunakan?
21. Apa saja kesulitan yang dihadapi ketika memberikan materi?



LAMPIRAN 5

Wawancara dengan Informan Personel Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

1. Informan I : Agus Suparja, SH

Bapak yang menjabat sebagai Kasi Lingkungan Kerja Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN ini bersedia meluangkan waktunya di sela-sela waktu kerjanya yang cukup padat. Pria kelahiran 26 Juni 1964 ini adalah seorang anggota POLRI dengan pangkat Inspektur Satu (IPTU).

Mengenai kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh beliau beserta Satkernya, beliau memberikan penjelasan yang sangat membantu penulis dalam menulis penelitian ini.

Hal pertama yang dilakukan adalah dengan melakukan penyusunan dokumen perencanaan, mengirimkan surat undangan dan mengumpulkan mereka untuk rapat koordinasi, kemudian melakukan kegiatan program pemberdayaannya. Setelah dilaksanakan kegiatan program pemberdayaan, kemudian dilakukan supervisi dan yang terakhir adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev).

Dijelaskan tidak ada kriteria khusus dalam pemilihan peserta program pemberdayaan tersebut, karena yang diundang adalah seluruh perusahaan yang ada, dan akhirnya yang mengikuti kegiatan tersebut adalah instansi-instansi yang mempunyai komitmen dan keinginan untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Selama tahun 2011, sementara ini sudah ada 9 program pemberdayaan yang sudah diadakan oleh Sub Direktorat Lingkungan Kerja BNN. Dimana satu kegiatan diikuti oleh sekitar 30, 90 dan 100 orang peserta.

Inti dari kegiatan program ini adalah pembentukan satgas di masing-masing instansi. Dan apabila satgas tersebut sudah terbentuk, satgas tersebut dilantik secara langsung oleh BNN, dan nantinya satgas tersebut yang akan bertugas di masing-masing instansi tersebut sebagai

partner BNN di dalam melakukan kegiatan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan kerjanya masing-masing.

Mengenai penentuan materi, ditentukan oleh Sub Direktorat Peran Serta Masyarakat, dan kemudian narasumbernya ditentukan sesuai dengan penguasaan materinya. Untuk narasumber sebagian besar masih dari lingkungan internal BNN, dan hanya beberapa saja yang dari eksternal BNN. Untuk jumlah personel, diakui masih kurang di dalam melaksanakan kegiatan tersebut dan diharapkan adanya penambahan personel.

Setelah diadakannya kegiatan program pemberdayaan tersebut, sekarang ini masih dalam taraf menunggu dari instansi peserta pemberdayaan untuk melakukan aksi selanjutnya dari mereka. Karena diharapkan instansi-instansi peserta tersebut dapat melakukan aksi lanjut dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh BNN.

Setelah diadakannya kegiatan pemberdayaan, masing-masing instansi tersebut akan membuat komitmen untuk mendukung gerakan pemberdayaan di masing-masing instansinya. Untuk mengukur dan menilai komitmen dari para peserta tersebut, nantinya akan dilakukan supervisi, kemudian diadakan monitoring dan evaluasi di masing-masing instansi tersebut.

Tujuan dari diadakannya supervisi serta monitoring dan evaluasi tersebut adalah akan diketahui karakter dari masing-masing instansi tersebut, sejauh mana mereka menindaklanjuti komitmen yang sudah mereka buat dan diharapkan mereka sudah membentuk satgas di masing-masing instansi. Instansi-instansi tersebut nantinya akan kembali dikumpulkan oleh BNN untuk dievaluasi bagaimana proses pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh mereka.

Disebutkan pula apabila ada instansi-instansi tersebut setelah dilakukan supervisi dan monitoring evaluasi tidak melakukan sesuai dengan komitmennya, mereka menganggap kegiatan pemberdayaan yang telah dilakukan berarti gagal.

Hal inilah yang akan terus dilanjutkan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN untuk mencari tahu sebabnya kenapa gagal, dan sasarannya akan lebih diperbanyak dan digiatkan lagi kegiatan pemberdayaan kepada instansi tersebut. Hal inilah yang nantinya akan menjadi evaluasi bagi internal BNN untuk lebih mengkaji program pemberdayaan masyarakat yang lebih mengenai sasarannya.

Dijelaskan lagi, untuk pertengahan tahun ini, belum diadakan supervisi dan monitoring evaluasi karena sasaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat belum semuanya dilaksanakan. Untuk sasaran supervisi adalah instansi-instansi yang menjadi peserta dari program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan, dan akan mengunjungi instansi-instansi tersebut untuk melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh satgas-satags bentukan BNN tersebut.

Kalau memang satgas tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, akan diberikan penghargaan untuk institusi sebagai perusahaan yang mendukung program penganggulangan penyalahgunaan narkoba. Dan bukan hanya institusi yang akan diberikan penghargaan, melainkan individu-individu yang berperan penting di dalam program pemberdayaan masyarakat di instansi masing-masing juga akan diberikan penghargaan atas prestasi kerjanya.

2. Informan II : Ir. Sri Haryati, M.Si

Ibu yang bertempat tinggal di daerah Cimanggis Depok ini sudah 8 tahun bekerja di BNN. Beliau mempunyai posisi sebagai Kepala Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.

Menurut beliau, jumlah personel staf di Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN sudah mencukupi untuk melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tetapi, untuk personel yang membidangi masalah keuangan, masih belum memadai dan belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya, sehingga kualitasnya dianggap kurang memenuhi

harapan. Hal inilah yang terkadang menjadikan kendala di dalam pencairan anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Diakui juga oleh ibu Sri bahwa jumlah narasumber yang ada di dalam Direktorat Peran Serta Masyarakat memang masih kurang karena masih keteteran dalam memenuhi permintaan narasumber yang diinginkan oleh masyarakat.

Untuk jumlah anggaran dalam mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dianggap masih kurang karena masih banyak sekali lingkungan pendidikan yang belum bisa tersentuh oleh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Untuk tingkat daerah dikarenakan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) belum aktif sepenuhnya, sehingga masih dilakukan pemberdayaan oleh BNN langsung.

Untuk menentukan peserta yang akan diikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat BNN, terlebih dahulu dipilih dari kampus-kampus yang rawan dengan penyalahgunaan narkoba dan dari beberapa kampus yang sudah melakukan MOU dengan BNN.

Untuk penentuan lokasi pemberdayaan masyarakat di daerah, pertimbangannya adalah dari data 10 (sepuluh) besar daerah yang rawan penyalahgunaan narkoba, dan yang memiliki data kasus penyalahgunaan terbesar. Data ini diambil dari hasil penelitian yang dilaksanakan BNN dengan Universitas Indonesia.

Untuk institusi, sudah ada kampus Universitas Pelita Harapan dan Universitas Paramadina yang sudah mengirimkan surat untuk meminta kesediaan BNN membantu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan oleh mereka. BNN masih menunggu kesiapan mereka dalam menyusun kegiatan yang akan mereka adakan sendiri atas inisiatif pihak kampus.

Akan tetapi, BNN dalam hal ini Direktorat Peran Serta Masyarakat tidak bisa membantu secara penuh kegiatan mereka karena terkait dengan program kegiatan yang sudah dibuat oleh BNN, hal ini terkait dengan masalah anggaran yang sudah diajukan di dalam DIPA. Akan tetapi, untuk

bantuan masalah narasumber dan juga pembagian leaflet, brosur, poster atau stiker, BNN masih bisa membantunya.

Dan apabila memungkinkan, bagi institusi pendidikan yang ingin mengadakan kegiatan, dapat diikut sertakan di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Dengan ikut sertanya mereka ke dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN, mereka dapat ikut mempromosikan kegiatan mereka sendiri dan BNN juga mempunyai keuntungan karena acara kegiatannya akan dipenuhi oleh peserta dan pengunjung yang cukup banyak. Hal ini tentu berdampak positif karena akan semakin banyak orang yang tersentuh di dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN.

Untuk pemilihan materi yang akan dipakai dalam kegiatan program pemberdayaan masyarakat, materi ditentukan oleh panitia dalam Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, dan barulah kemudian diberikan kepada narasumber untuk dijadikan bahan pemberdayaan oleh mereka. Sebagai contoh, jika ingin memberikan materi tentang pengetesan urine, maka narasumber yang akan diikut sertakan adalah narasumber dari Lab Uji Narkoba BNN. Narasumber inilah yang akan memberikan materi di dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan nantinya.

Dan apabila insistusi tersebut sudah memiliki satgas, maka satgas inilah yang akan diberikan materi pemberdayaan mengenai bagaimana nantinya ketika satgas bertugas akan menemukan barang bukti narkoba, penanganan penyalahgunanya dan juga apa yang harus dilakukan dalam menghadapi permasalahan tersebut di lapangan nantinya.

Standard Operating Procedure (SOP) memang belum ada di dalam lingkungan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Menurut arahan Biro Perencanaan BNN, bahwa pemberdayaan masyarakat itu adalah keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan dimulai dari pencegahan, terapi dan rehabilitasi, juga penegakan hukum atau pemberantasan.

3. Informan III : Hadi Prasetyo

Pria yang bertempat tinggal di daerah Slipi ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pendidikan Tinggi Sub Direktorat Lingkungan Pendidikan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Beliau membantu penulis dalam memberikan beberapa informasi mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Beliau sudah bekerja di BNN selama 6 tahun dan merupakan angkatan pertama dari penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BNN.

Menurut beliau, jumlah personel yang ada sudah mencukupi untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang cukup ideal dengan kualitas personelnnya yang cukup mumpuni dan untuk saat ini sudah sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Untuk anggaran dianggap sudah mencukupi karena masih bisa melaksanakan berbagai kegiatan dengan baik.

Untuk pemilihan peserta diambil dari data awal dari jumlah sekolah, kampus yang ada di dalam database BPS, ataupun DIKTI. Dan diprioritaskan kepada kampus-kampus yang mempunyai komitmen khusus terhadap penanggulangan bahaya narkoba di kampusnya masing-masing.

Dan dalam menentukan institusi yang akan diikuti sertakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, dibentuk tim kecil untuk melakukan pemilihan kampus yang akan diundang. Untuk kampus-kampus yang akan mengadakan kegiatannya sendiri, kebanyakan dari mereka hanya mengajukan permintaan untuk narasumber.

Untuk menentukan materi yang akan dipilih ditentukan dari Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, kemudian disesuaikan dengan agenda kegiatan yang sudah dianggarkan dalam DIPA. Dan dalam menentukan narasumbernya tergantung dari materi yang akan diberikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Tidak ada standar khusus dalam pemilihan narasumber, karena narasumber yang dipilih biasanya hanya berdasarkan materi yang akan diberikan saja. Dan dalam memberikan materi, narasumber tersebut hanya diberikan waktu sekitar 90 menit. Sedangkan koordinasi dari

panitia di dalam Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dengan narasumber cukup terjalin dengan baik, dalam arti sebelum diadakannya kegiatan dilaksanakan, akan diadakan rapat kecil dahulu untuk membahas materi dan peserta yang akan mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dan setelah kegiatan akan diadakan review dari hasil kegiatan tersebut untuk menentukan kegiatan selanjutnya nanti.

Apabila dikemudian hari ada institusi yang tidak mengikuti komitmen yang sudah dibuat ketika kegiatan itu berlangsung, insititusi tersebut tidak akan diajak lagi untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat selanjutnya. Karena menurut beliau, apabila mereka tidak melakukan komitmen yang telah dibuat, berarti mereka tidak memiliki kepedulian akan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan. Dan kemungkinan institusi tersebut tidak akan diikuti sertakan lagi di dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat selanjutnya.

LAMPIRAN 6

Wawancara dengan Informan Narasumber Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN

1. Informan I : Yudi Kusmayadi

Pria kelahiran September 1954 ini mempunyai posisi sebagai Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung) Deputy Pencegahan. Beliau sudah 7 (tujuh) tahun bekerja di BNN. Beliau sering dijadikan narasumber oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN juga oleh Deputy Pencegahan BNN untuk menyampaikan materi-materi yang berhubungan dengan penyuluhan ataupun pemberdayaan masyarakat.

Dijelaskan beliau bahwa kalau berbicara tentang peran serta, sangat berbeda dengan pencegahan. Jadi, materi untuk pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN berbeda dengan materi penyuluhan untuk Deputy Pencegahan. Dalam arti, materi untuk peran serta adalah materi yang khusus karena syarat yang pertama adalah harus ada orang atau peserta yang siap dan mempunyai komitmen untuk melakukan sesuatu setelah dilakukan pembekalan dalam kegiatan pemberdayaan. Para peserta pemberdayaan lebih difokuskan kepada aksi selanjutnya setelah kegiatan pemberdayaan tersebut.

Dalam pembuatan materi, karena personilnya masih terbatas, beliau menjelaskan bahwa tidak ada tim khusus dalam pembuatan materi yang akan diberikan. Tetapi, apabila akan memberikan materi yang berhubungan dengan bidang hukum, beliau akan berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mencari materi yang berhubungan dengan bidang hukum. Hanya saja, cara menyampaikannya akan berbeda dengan orang menyampaikan materi tentang undang-undang. Cara beliau menyampaikannya akan lebih implementatif.

Dalam proses pembuatan materi, beliau biasanya meminta waktu minimal satu minggu sebelum acara agar beliau bisa mengenal peserta, mencari data dan membuatnya menjadi suatu bahan materi untuk diberikan kepada peserta pemberdayaan masyarakat.

Dalam menyajikan sebuah materi, diupayakan bagaimana materi tersebut dapat diserap dengan baik oleh para peserta, salah satu alat bantu standar adalah peralatan IT, seperti *laptop* dan *lcd projector*. Dan juga terkadang alat-alat bantu lain dipergunakan untuk membuat agar pemberian materi tersebut dapat diserap dengan baik. Ada tiga hal penting yang selalu beliau pegang dalam menyampaikan materi pemberdayaan, antara lain materi, metode dan alat. Dan juga beliau akan menggunakan semua *resources* untuk mendukung proses pemberian materi pemberdayaan. Sebelum membuat materi, beliau harus tahu siapa pesertanya, kelompok mana dan apa yang diminta.

Dalam menyampaikan materi, beliau sedang mengembangkan metode edukatif preventif dan *edutainment*, menggabungkan antara penyampaian materi dan hiburan. Hiburan dalam hal ini bukan berarti dengan adanya musik, atau pertunjukan lain, melainkan dengan variasi bicara, bagaimana cara membuat orang tertawa, sehingga dalam memberikan materi dapat memancing minat peserta untuk serius mendengarkan dan menghilangkan kejenuhan dari pesertanya sendiri. Juga harus memberikan materi yang mudah dicerna secara nalar, tidak perlu membuat orang berpikir keras untuk mencerna apa maksud dari materi yang diberikan. Dalam pemberian materi bisa dimasukan unsur-unsur film, humor, dan lain-lain untuk menambah minat peserta mendengarkan materi yang disampaikan.

Dalam memberikan materi, biasanya beliau diberikan waktu selama 90 (sembilan puluh menit). Tetapi, apabila diberikan waktu lebih, beliau akan lebih bersemangat untuk memberikan materinya. Tetapi sebaliknya, seandainya waktu yang diberikan jauh lebih sedikit, beliau akan dapat menyesuaikan dengan waktu yang diberikan tersebut.

Faktor tersulit dalam memberikan materi adalah ketika memulai pembicaraan. Karena itu diperlukan improvisasi yang baik dalam memulai komunikasi dengan para peserta. Tetapi, apabila sudah terjalin komunikasi yang baik diawal pemberian materi, hal selanjutnya akan semakin baik dan memperlancar pemberian materi.

Materi pemberdayaan masyarakat ada dua jenis yang pernah dilaksanakan, yang pertama adalah seminar dan yang kedua adalah workshop. Seminar adalah membicarakan sesuatu hal yang sudah diketahui oleh para peserta. Sedangkan konsep workshop ini adalah, narasumber memberikan satu permasalahan atau gagasan, dan para peserta akan bekerja sama dalam memecahkan permasalahan atau memberikan tanggapan atas gagasan yang diberikan tersebut.

Apabila ada institusi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan melaksanakan aksi lanjutan setelah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, dan kegiatan tersebut memerlukan narasumber BNN sebagai pembicaranya, dijelaskan bahwa institusi tersebut haruslah membuat surat permohonan resmi kepada BNN, dan kemudian BNN yang akan menunjuk siapa yang akan dikirim sebagai narasumber di dalam kegiatan tersebut.

Dijelaskan juga bahwa kelemahan dari Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN adalah bahwa belum ada standar khusus dalam penentuan narasumber yang akan memberikan materi pemberdayaan masyarakat. Pemilihan narasumber lebih ditujukan kepada personal yang menguasai sesuatu permasalahan. Ketika seseorang menguasai sesuatu permasalahan, kemudian dialah yang akan ditunjuk untuk menjadi narasumber di suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Justru beliaulah yang sedang membuat pedoman dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk Pokjabfung sebagai narasumber BNN. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa untuk penentuan narasumber belum ada Standard Operating Procedure (SOP), lebih menitikberatkan pada tupoksi dari narasumber itu sendiri.

Selama ini koordinasi dengan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN dirasakan sudah cukup untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ideal, dalam arti sebelum ditentukan siapa, apa dan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan, akan diadakan rapat kecil dahulu untuk menentukan hal-hal tersebut. Jadi, apabila Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN akan mengadakan suatu kegiatan pemberdayaan

masyarakat, sebelumnya berkoordinasi dengan beliau dulu untuk menentukan materi dan peserta yang akan diikuti dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut.

Dijelaskan juga bahwa, adanya perbedaan yang mendasar ketika pemberdayaan masyarakat masih berada di Puscegah BNN dan ketika sudah menjadi suatu Deputi bidang. Perbedaannya adalah bahwa ketika masih di Puscegah, masih sebatas pemberian materi pemberdayaan tanpa mendorong institusi untuk melakukan pembentukan satgas, dan juga tidak adanya supervisi serta monitoring evaluasi. Dan juga ruang lingkupnya hanya dibatasi kepada unsur lingkungan masyarakat. Setelah berada di Deputi Pemberdayaan Masyarakat, ruang lingkup pemberdayaan masyarakat jauh lebih luas, dengan jumlah peserta dan sasaran yang jauh lebih banyak. Dimana bukan hanya lingkungan masyarakat saja yang didorong untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya, tetapi sudah menyentuh kepada lingkungan pekerjaan, dan juga lingkungan pendidikan, baik lingkungan tinggi maupun lingkungan dasar dan menengah.

Sewaktu masih berada di dalam Puscegah, kegiatan pemberdayaan masyarakat masih dalam tahap pemberian informasi, tanpa ada tindakan selanjutnya. Hal ini berbeda dengan yang sekarang, dimana sebelum diadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, diadakan suatu Rapat Koordinasi (RAKOR) dengan para calon peserta pemberdayaan masyarakat, baru kemudian dilakukan kegiatan pemberdayaannya, selanjutnya akan dilakukan supervisi dan monitoring evaluasi untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dan juga untuk menilai kinerja dari Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN.

Beliau juga memberikan trik-trik tentang bagaimana menghadapi peserta dalam memberikan materi pemberdayaan. Hal yang pertama adalah mengenali peserta dengan baik, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan dan berbagai hal lain yang bisa dipakai untuk menjalin komunikasi yang baik dengan peserta kegiatan. Beliau juga menambahkan

agar setelah diadakan kegiatan, dibuat suatu evaluasi sebagai *feedback* kepada narasumber.

Beliau menjelaskan kata kunci pertama dalam suksesnya memberikan materi adalah menyesuaikan dengan peserta. Kita harus tahu apa yang diinginkan oleh peserta, bukan apa yang diinginkan oleh pihak panitia. Terkadang beliau dalam memberikan materi, materi yang diberikan tidak sesuai dengan materi awal yang diberikan panitia. Hal ini terjadi karena setelah diadakan *test case*, ternyata materi awal yang akan diberikan tidak sesuai dengan keadaan dan keinginan peserta. Jadi, intinya adalah kita menyesuaikan dengan peserta.

Kata kunci kedua adalah materi. Materi menyesuaikan dengan apa keinginan peserta. Dan yang ketiga adalah teknik, yaitu memanfaatkan semua potensi yang ada. Potensi dalam hal ini, bukan hanya potensi diri dari narasumber, melainkan termasuk dengan peralatan pendukung. Ditegaskan lagi, kata kunci pertama itulah yang menjadi dasar dari suksesnya narasumber dalam memberikan materi pemberdayaan masyarakat.

Ketika disinggung tentang berapa jumlah narasumber BNN, beliau mengatakan bahwa kebutuhan akan narasumber BNN masih sangat besar karena narasumber yang ada sekarang masih sangat sedikit personalnya, jauh dari ideal. Menurut beliau, idealnya adalah setiap unit adalah satu narasumber, karena seandainya ada tugas di bidang-bidang BNN (Rehabilitasi, Pencegahan, Pemberantasan, Pemberdayaan Masyarakat, Kerjasama) sudah bisa ditentukan siapa narasumbernya yang bertugas memberikan materi di kegiatan tersebut. Jadi, ketika ada permintaan narasumber dari kelompok manapun, sudah ada pendelegasian tugasnya masing-masing yang sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing.

Harapan beliau untuk ke depan adalah, BNN dalam hal ini harus memiliki pedoman dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dapat digunakan oleh siapa saja, dalam hal ini sebaiknya orang BNN diharapkan mampu memberikan informasi tentang Pencegahan, Pemberantasan,

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Hal inilah yang harus diupayakan untuk dibentuk, jangan seperti yang sekarang, yang memiliki prinsip *the show must go on*, apapun yang terjadi, kegiatan program pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan.

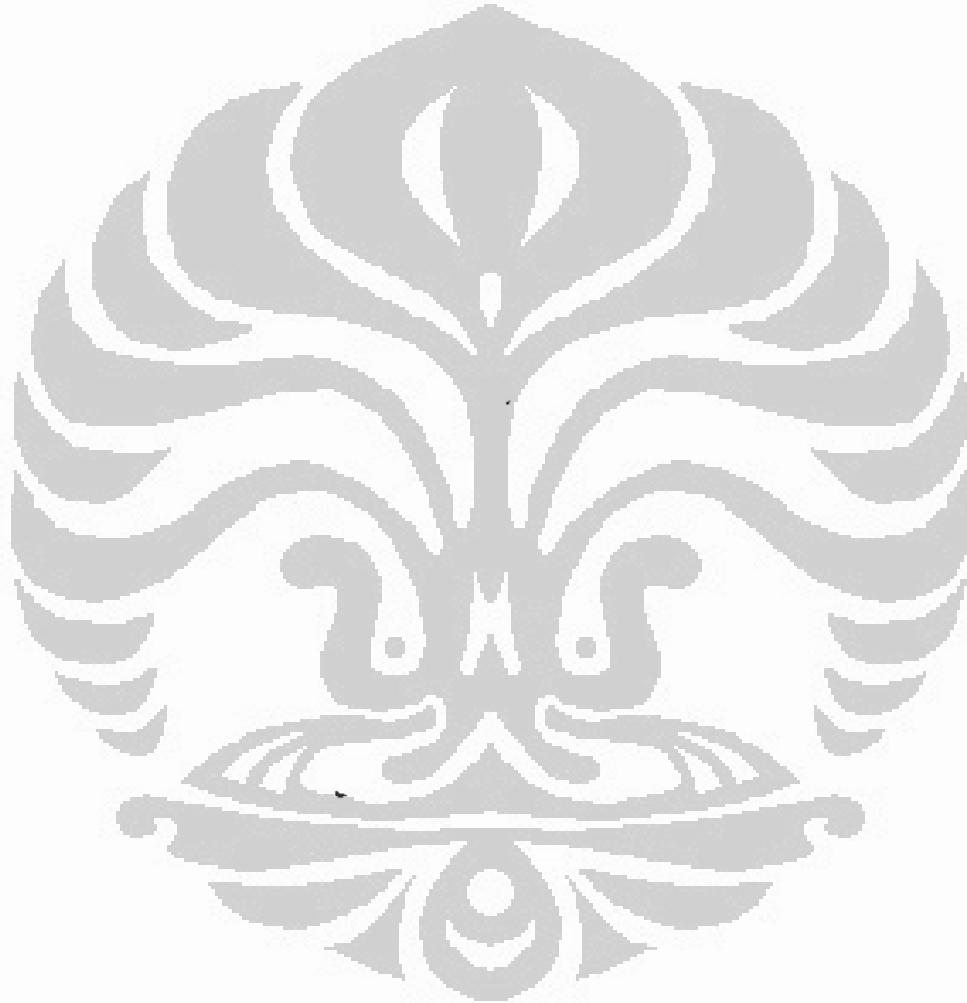
Dijelaskan juga, bahwa yang namanya kegiatan pemberdayaan masyarakat atau dalam hal pemberian materi, sayarat utamanya adalah harus dalam satu kesatuan sebagai tim. Sayangnya, di dalam Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN tim ini masih bersifat parsial, dalam arti masih tergantung daripada kebutuhan. Diharapkan tim yang terbentuk nantinya, harus menjadi pilar di dalam setiap kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Dan dari latar belakang pendidikan dari personelnnya masih belum sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Diharapkan beliau, sebelum menentukan peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebaiknya ditentukan berdasarkan sasaran prioritas. Misalkan lingkungan swasta, harus diperjelas swasta itu yang mana? Dan di lingkungan swasta tersebut, siapakah yang menjadi sasaran kegiatan program pemberdayaan masyarakat? Kalau perlu bisa minta bantuan dari Kepala BNN, dan hal ini adalah wajar untuk dilakukan. Dan apabila hal ini dilakukan, sasaran dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat lebih mengena kepada jajaran atas dari level manajemen institusi peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena, pembicaraan dengan level manajer, karyawan ataupun buruh masing-masing cara pemberian materinya tentu berbeda-beda.

Yang selalu beliau tekankan kepada Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, diingatkan bahwa pemberdayaan masyarakat berhubungan dengan komunitas. Karena di tingkat sekolah saja ada komunitas guru, pelajar, dan juga orang tua. Kita harus tahu, komunitas mana yang harus kita jadikan sasaran. Hal inilah yang harus dijadikan sebagai pedoman dalam mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Yang menjadi penutup wawancara penulis dengan informan adalah tentang kendala-kendala yang dihadapi ketika memberikan materi

pemberdayaan masyarakat. Kendala yang dihadapi adalah ketika ada peserta yang membutuhkan jawaban dari pertanyaannya tentang aspek dari komitmen institusi. Aspek yang menyangkut komitmen terkadang tidak pernah terjawab karena belum adanya SOP dari kegiatan tersebut. Kalau berbicara tentang materi, beliau bisa berdebat tentang isi materi yang beliau bawakan, tetapi ketika diperlukan satu komitmen yang sifatnya suatu kebijakan, beliau terkadang tidak bisa menjawab hal tersebut.



LAMPIRAN 7

Wawancara dengan Informan Institusi Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Pekerjaan

1. Informan I : Ana Dhirmasyah

Bapak Ana Dhirmansyah atau yang akrab dipanggil dengan bapak Ikhun adalah Staff Supervisor pada PT. Sanyo Jaya Components Indonesia. Pria yang berumur 40 tahun ini telah bekerja selama lebih dari 15 tahun di PT Sanyo Jaya Components Indonesia. Informan yang satu ini kelahiran Jawa Barat dan mempunyai logat kental darah Sunda.

Peneliti mempunyai kesan yang mendalam terhadap informan yang satu ini pada saat melakukan wawancara, karena peneliti merasa mudah akrab dengan beliau yang masih berpenampilan muda dan tidak terpaut cukup jauh usianya dengan penulis. Ini terbukti pada saat peneliti memulai peroses wawancara ternyata bapak ini menerima dengan ramah dan terbuka, dan beliau sangat membantu penelitian ini dalam memperoleh data, beliau tidak segan-segan memberikan informasi sangat mendetil tentang keadaan di dalam lingkungan pekerjaannya.

Penulis merasa sangat bersemangat dalam memberikan pertanyaan penelitian pada saat wawancara dilakukan. Yang pertama peneliti tanyakan adalah identitas beliau terlebih dahulu. Kemudian peneliti menanyakan tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikuti oleh beliau selaku perwakilan dari PT Sanyo Jaya Components Indonesia. Menurut beliau kegiatan yang dilakukan Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional cukup bagus karena sangat memancing antusias para peserta pemberdayaan di perusahaannya. Seluruh peserta berjumlah lebih dari 100 orang karyawan PT Sanyo Jaya Components Indonesia dengan 90% nya adalah karyawan wanita.

Kegiatan yang dilakukan Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional, diakui beliau sangat mengenai sarannya. Karena dapat menambah pengetahuan yang lebih banyak bagi para peserta, ini

terbukti ada sekitar 40 orang yang mengajukan pertanyaan pada saat kegiatan tersebut. Dan kegiatan yang dilaksanakan sangat bermanfaat bagi para peserta kegiatan tersebut. Beliau mengharapkan adanya kelanjutan dari kegiatan pemberdayaan tersebut.

Di perusahaan tempatnya bekerja ternyata ada peraturan khusus tentang penyalahgunaan narkoba di lingkungan pekerjaannya. Peraturan ini terbentuk semenjak dibentuknya SPSI, sekitar tahun 1993. Tetapi menurut beliau, belum ada kasus yang terungkap di dalam perusahaan. Penulis mencoba bertanya kepada beliau, apakah bersedia melaporkan para karyawan yang terkena narkoba kepada pihak manajemen, dan beliau dengan tegas berani melaporkan karena itu berhubungan juga dengan nama baik perusahaan.

Beliau juga menyadari, permasalahan narkoba banyak terjadi di berbagai lingkungan masyarakat. Tetapi, memang banyak pihak keluarga yang malu untuk melaporkan anggota keluarganya yang terkena permasalahan narkoba. Beliau pun akhirnya menyadari, dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diikutinya, beliau mendapat pengetahuan tentang adanya UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa pihak keluarga yang tidak melaporkan anggota keluarganya yang menjadi penyalahguna narkotika juga dapat dituntut hukuman penjara.

Yang disayangkan beliau pada saat kegiatan tersebut adalah, tidak ikutnya pihak manajemen perusahaan yang berasal dari Jepang langsung. Karena mereka itulah yang berwenang di dalam peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan. Hal itulah yang menjadi kendala karena untuk tindak lanjut dari program kegiatan tersebut belum dapat terlaksana.

Ketika ditanyakan apakah ada pemeriksaan urine di perusahaan, beliau menjawab tidak ada. Sehingga untuk tindakan preventif tidak dapat dilaksanakan. Tetapi ketika beliau ditanyakan, apakah ada keinginan untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional dalam rangka pemeriksaan urine terhadap karyawan, beliau tidak bisa memberikan jawaban karena wewenangnya adalah dari pihak manajemen (PMA).

Untuk peraturan sebenarnya memang cukup ketat, karena untuk larangan merokok pun benar-benar diatur di dalam lingkungan perusahaan. Dan kalau ada yang ketahuan merokok tidak pada tempatnya akan diberikan sanksi yang cukup berat. Hal ini mungkin bisa untuk menekan adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan pekerjaan.

Diakui juga, hubungan dengan Badan Narkotika Nasional, terutama Direktorat Peran Serta Masyarakat telah terjalin dengan cukup baik. Sehingga sangat diharapkan adanya kegiatan yang berkelanjutan antara Badan Narkotika Nasional dan PT. Sanyo Jaya Components Indonesia.

2. Informan II : Respati Prihantono. B

Pria berdarah Jawa – Sunda ini mempunyai posisi sebagai Humas dari P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) PT. Mustika Ratu. Beliau ini tergolong pria yang ramah, karena ketika penulis meminta waktu untuk mewawancarainya, beliau bersedia meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya di kantor yang sedang mengadakan suatu kontes penjurian.

Menurut pria berumur 30 tahun ini, materi yang disampaikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN sangat bermanfaat, baik untuk dirinya sebagai individu, juga untuk perusahaan tempatnya bekerja. Beliau berpendapat bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, dirinya jadi lebih mengenal apa itu narkotika, prekursor, dll. Bagaimana dari pentol korek api, obat batuk, dan bahan-bahan lainnya yang berada di sekitar lingkungan tempat kerjanya mempunyai kandungan prekursor yang apabila disalahgunakan dapat dijadikan menjadi narkoba.

Hal seperti inilah yang menjadikan beliau antusias mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN tersebut. Karena dengan mengenal lebih dekat dengan narkoba, diharapkan kita dapat mengetahui dampak buruk dari narkoba dan mengerti bagaimana cara untuk menghindarinya serta dapat mengetahui bagaimana caranya agar orang-orang terkasih di

sekitar kita juga bisa terhindar dari bahaya narkoba dan juga bagaimana cara meannnggulangnya..

Dikatakan lagi oleh pria yang bertempat tinggal di Tanah Baru Ciganjur ini, kegiatan yang dilaksanakan BNN itu telah ditindaklanjuti oleh pihak manajemen perusahaannya. Hal ini terbukti dengan direvisinya peraturan yang ada di perusahaan dengan memasukkan opsi bahwa kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan perusahaan merupakan pelanggaran berat yang sanksinya bisa sampai ke tahap pemberhentian dengan tidak hormat. Ternyata hal tersebut pernah dilakukan oleh perusahaan ketika ada seorang pegawainya menjadi penyalahguna narkoba, setelah diberi peringatan agar dapat menjauhi narkoba dan ternyata tetap tidak bisa lepas dari ketergantungan akan narkoba, maka perusahaan dengan tegas memberikan sanksi pemecatan terhadap pegawai tersebut.

Beliau juga menceritakan bahwa sudah dibentuk Satgas di dalam kepengurusan struktur organisasi P2 K3 yang ada di dalam lingkungan PT. Mustika Ratu. Satgas ini rencanya ke depan akan bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pemberdayaan di lingkungan internal perusahaan sebagai salah satu upaya di dalam penganggulangan penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan perusahaan. Hal ini merupakan langkah yang sangat bagus bagi program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN karena kegiatan yang dilaksanakan oleh mereka sudah berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, di mana institusi dari peserta program pemberdayaan masyarakat, diharapkan membentuk satgas sebagai langkah awal dalam hal penanggulangan penyalahgunaan narkoba di lingkungan mereka masing-masing.

Bahkan satgas ini sudah membuat suatu terobosan dengan akan mengadakan sosialisasi dalam rangka mengadakan kegiatan pemberdayaan internal di lingkungan tempat kerja mereka. Hal ini sudah dikoordinasikan dengan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, dimana mereka akan meminta bantuan narasumber dari BNN untuk memberikan informasi

dalam kegiatan yang akan mereka laksanakan dalam waktu dekat ini. Hal ini betul-betul suatu langkah yang baik bagi program pemberdayaan masyarakat karena target sasaran berikutnya pun sudah hampir tercapai, yaitu satgas bisa bergerak untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan di internal lingkungan mereka sendiri.

Para pekerja PT. Mustika Ratu, sebagian besar berasal dari lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, yaitu di daerah Ciracas Jakarta Timur. Dan diharapkan program pemberdayaan yang dilaksanakan di dalam lingkungan perusahaan tersebut dapat memberikan aspek yang positif bagi lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan. Hal ini tentu mempunyai dampak yang luas karena apabila hal itu tercapai, bukan hanya lingkungan tempat mereka bekerja saja yang terhindar dari dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Lingkungan masyarakat tempat para karyawan tersebut tinggal pun akan merasakan dampak positif dari program pemberdayaan yang dilaksanakan di dalam lingkungan kerja PT. Mustika Ratu.

Dan diharapkan dengan adanya program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan itu, nantinya akan juga menyentuh masyarakat di sekitar tempat mereka bekerja, bekerja sama dengan aparat daerah setempat di dalam hal pemberdayaan masyarakat mensosialisasikan dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba.

3 Informan III : Maria Dasion

Ibu yang berasal dari Larantuka, Flores ini menjabat sebagai *Human Resources Development (HRD) Manager* dari PT. Mustika Ratu. Beliau sudah 22 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Penulis berterimakasih sekali kepada informan yang satu ini karena disela-sela kesibukannya memandu acara penjurian yang ada di kantornya, beliau masih berkenan untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis.

Ketika ditanyakan pendapatnya mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat

BNN, beliau berpendapat bahwa acara tersebut sangat bagus karena masyarakat umum memang perlu diberikan pemahaman secara terus menerus mengenai bahaya dari dampak penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar kita, apalagi narkoba lebih banyak menyerang masyarakat di level usia yang produktif. Dan beliau memahami bahwa dengan adanya kegiatan tersebut, para peserta kegiatan diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada rekan-rekannya yang lain.

Mengenai isi dari pemberian informasi yang disampaikan oleh narasumber, beliau merasa senang karena bisa mendapatkan informasi baru, yang dimana sebelumnya sama sekali tidak pernah mengenal akan narkoba. Dengan adanya kegiatan pemberdayaan tersebut, diakui menambah pengetahuan para pesertanya sehingga dapat memahami tentang apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekitar mereka.

Dari pihak beliau yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia (SDM) di kantornya, menganggap bahwa acara seperti itu memang sangat penting, sehingga merasa diperlukan untuk mengirimkan sepuluh personil untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dijelaskan juga bahwa dari perusahaan sudah ada tim dari Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan permasalahan narkoba sudah dimasukkan ke dalam peraturan yang mengikat dalam salah satu seksi dari P2K3 tersebut. Dan juga sudah dilakukan restrukturisasi organisasi P2K3 untuk menampung kepengurusan yang baru yang membawahi permasalahan narkoba tersebut. Satgas hasil restruktur kepengurusan ini sudah dibentuk dan diresmikan oleh pihak perusahaan.

Diceritakan juga oleh beliau mengenai situasi lingkungan pekerjaan dari PT. Mustika Ratu yang dikelilingi oleh lingkungan pemukiman di daerah Ciracas Jakarta Timur. Dimana salah satu bentuk *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari perusahaan adalah dengan merekrut sebagian besar karyawan yang berasal dari lingkungan tempat tinggal di sekitar perusahaan.

Dan juga dijelaskan mengenai apabila ada karyawan dari perusahaan yang menjadi penyalahguna narkoba, menurut beliau tetap harus mengikuti peraturan yang sudah disepakati sebagai bentuk kewajiban dari serikat pekerja yang mengikat kepada perusahaan.

Ketika pada saat kegiatan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, para peserta dari PT. Mustika Ratu berasal dari beberapa bagian, seperti bagian produksi, engineering, dan sebagian besar adalah pengurus dari P2K3. Dan dari beberapa karyawan yang terlibat tersebut, sudah ada yang memiliki kemampuan sebagai pembicara yang nantinya akan digembleng lagi agar bisa lebih menguasai permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba.

Dijelaskan juga bahwa pada tanggal 1 Juli nanti akan diadakan sosialisasi dengan peserta adalah karyawan dari PT. Mustika Ratu, dan yang akan diundang sebagai narasumber adalah Pak Joko, yang merupakan narasumber dari BNN juga. Hal ini sangat menggembirakan karena adanya peran aktif dari para peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat BNN yang langsung mengambil sikap dengan aksi nyata melanjutkan program pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Hal ini sesuai dengan target sasaran dari Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN yang mengharapkan adanya peran aktif dari satgas hasil binaan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN. Dan untuk langkah awal, yang bisa dilakukan oleh BNN itu adalah dengan mengirimkan narasumbernya sebagai pembicara di dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi penggiat kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan, PT. Mustika Ratu sudah melakukan koordinasi secara intens dengan pihak BNN agar acara yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dan kegiatan tersebut sudah dimasukkan ke dalam kalender kerja perusahaan, agar apabila acara tersebut telah berhasil dilaksanakan, bisa dijadikan kegiatan rutin dari perusahaan.

LAMPIRAN 8

Wawancara dengan Informan Institusi Peserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Pendidikan

1. Informan I : Putri Indah Bekti

Mahasiswi berumur 22 tahun mempunyai jabatan sebagai Sekretaris Senat Mahasiswa Universitas Paramadina Jakarta. Gadis yang satu ini bertempat tinggal di belakang kampus dengan indekos. Gadis kelahiran Jakarta ini ternyata keturunan Jawa – Medan, orang tuanya tinggal di daerah Jawa Barat.

Di Universitas Paramadina, gadis ini mengambil jurusan Falsafah Agama dari Fakultas Falsafah dan Peradaban, sudah masuk semester 6. Informan yang satu ini sangat ramah dan terbuka, beliau sangat membantu penulis dalam memberikan keterangan tentang kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional yang diikutinya, dimulai dari rapat koordinasi sebelum acara pemberdayaannya.

Dalam proses wawancara dengan Putri, peneliti merasa sangat *enjoy* dan lepas dalam mengajukan pertanyaan, sehingga proses wawancara berlangsung ramai dan santai. Dalam berlangsungnya proses wawancara, penulis merasa sangat terbantu karena Putri ternyata sudah mengerti apa maksud dari tujuan peneliti sehingga dengan lancar menjawab dan mengaplikasikan tentang pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional.

Masukan-masukan dan informasi-informasi yang sangat bermanfaat peneliti dapatkan dari Putri ketika proses wawancara berlangsung dan beliau membuka ruang untuk penulis melakukan diskusi tentang bagaimana caranya agar proses pemberdayaan yang dilaksanakan dapat mengenai sasaran dalam targetnya di kalangan mahasiswa.

Menurut Putri, kegiatan yang dilaksanakan tersebut cukup signifikan karena disitu memberikan masukan-masukan kepada mahasiswa, selain itu juga memberikan ide-ide baru bagi mahasiswa untuk menggabungkan ide yang sama

dalam hal pemberantasan narkoba di lingkungan kampus. Dari acara tersebut, ilmu yang diberikan oleh para narasumber juga memberikan masukan-masukan pengetahuan yang lebih luas tentang narkoba itu seperti apa dan bagaimana kita menjauhinya.

Dan lagi menurut Putri, mahasiswa sangat berperan dalam program penganggulangan narkoba di lingkungan kampus. Terlebih lagi karena dengan diikutkannya pihak kampus yang melingkupi dosen, rektorat dan keamanan kampus. Tetapi saat acara tersebut masih menghadapi kendala karena pada saat setelah acara tersebut, para mahasiswa masih disibukkan dengan adanya Ujian Akhir Semester (UAS) dan juga ada yang sedang dalam tahap penyusunan tugas akhirnya. Jadi, juga masih dalam tahap regenerasi (pengkaderan). Oleh sebab itu, mereka lebih menekankan kepada mahasiswa-mahasiswa baru di angkatan 2010-2011 untuk lebih ditingkatkan lagi peran sertanya di dalam kegiatan tersebut.

Putri berpendapat bahwa kegiatan tersebut memang sangat bernilai positif karena memberikan penambahan wawasan yg lebih tentang narkoba. Menurut Putri, lingkungan perguruan tinggi hanya lingkup yang kecil karena ruang lingkungannya sangat terbatas dan tidak mengena ke dalam lingkungan keluarga. Tetapi hal ini coba dijelaskan oleh penulis, karena untuk permasalahan pemberdayaan di dalam lingkungan keluarga sudah ada bagian lain dari Badan Narkotika Nasional yang mengurus hal tersebut, dalam hal ini adalah Sub Direktorat Lingkungan Kerja dan Masyarakat. Dan hal ini sudah dapat dimengerti oleh Putri sehingga permasalahan yang diutarakannya dapat terselesaikan dan dipahami dengan baik.

Menurut Putri, di dalam lingkungan kampus Universitas Paramadina ada peraturan khusus yang membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Bagi pengguna yang kedapatan memakai narkoba di lingkungan kampus, akan dikeluarkan.

Pernah ada yang terkena sanksi dikeluarkan dari kampus, dan ada juga yang diberikan sanksi ringan, hanya diberikan surat peringatan saja untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pada saat acara kegiatan dengan Direktorat Peran Serta Masyarakat Badan Narkotika Nasional sebelumnya, juga dilaksanakan pemeriksaan urine.

Dan hasil yang didapat adalah negatif bagi beberapa peserta yang diambil secara acak pada saat pemeriksaan.

Hanya saja, untuk pemeriksaan bagi mahasiswa baru masih belum diwajibkan untuk adanya surat bebas narkoba ataupun pemeriksaan urine.

Dan ketika terselenggaranya kegiatan pemberdayaan di Universitas Paramadina, narasumber Badan Narkotika Nasional ada yang merupakan Kepala Lab Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional. Dari penjelasan beliau, dijelaskan berbagai cara dalam pemeriksaan narkoba bagi perseorangan, antara lain selain dari urine juga bisa melalui keringat dan rambut. Hal ini ternyata merupakan pengetahuan baru bagi mahasiswa yang sangat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan mereka.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat semakin melecut semangat para mahasiswa Universitas Paramadina dalam membentuk satgas anti narkoba. Selama ini di Universitas Paramadina memang sudah ada organisasi Paramadina Anti Drugs. Selama ini memang sudah vakum, karena para penggagas sebelumnya sudah tamat dan keluar kampus, tetapi belum sempat dilaksanakan pengkaderan terhadap junior-junior angkatan di bawahnya.

Dan informan kita ini sudah ditentukan sebagai pelopor dalam pembentukan satgas anti narkoba di kampusnya. Untuk awalnya, sudah ditentukan 5 orang mahasiswa untuk menjadi pengurus dalam satgas tersebut. Dan diharapkan dengan terbentuknya satgas, satgas yang terbentuk ini akan menjadi mitra dari Badan Narkotika Nasional. Pembentukan satgas ini hanya tinggal menunggu persetujuan dari manajemen kampus untuk meresmikannya.

2. Informan II : Mirna Safitri

Informan yang satu adalah Staff Senat Mahasiswa Universitas Paramadina Jakarta. Dalam kegiatan sehari-harinya dalam senat, gadis ini bertugas membantu Putri di dalam kegiatan sekretariat dari Senat Mahasiswa.

Gadis ini masih berumur 21 tahun dan merupakan keturunan Jawa – Sunda. Di Universitas Paramadina, Mirna mengambil jurusan Falsafah Agama dari Fakultas Falsafah dan Peradaban, juga sudah masuk di semester 6, sehingga sudah disibukkan dengan tugas akhir juga.

Pada saat kegiatan pemeriksaan urine di kampus Universitas, gadis ini menjadi salah satu yang bersedia untuk dites sampel urinenya, dan hasilnya adalah negatif, karena memang dia tidak pernah memakai narkoba jenis apapun.

Menurut Mirna, diharapkan satgas yang terbentuk nanti akan menjadi garis terdepan dalam menghadapi permasalahan narkoba di dalam lingkungan kampus. Satgas diharapkan juga menjadi tenaga penyuluh bagi rekan-rekannya di kampus untuk memberikan informasi-informasi tentang narkoba.

Harapan dari Mirna dengan terjalannya kerjasama dengan BNN, agar BNN, dalam hal ini Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN agar berkomitmen dengan janji dan perkataannya yang bersedia membantu pihak kampus dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat di dalam lingkungan kampus Universitas Paramadina.

Mirna berpendapat bahwa sangat pas sasaran dari BNN dalam mengadakan pemberdayaan masyarakat di Universitas Paramadina. Bahkan, informan kami ini sudah mempunyai rencana, apabila satgas ini nanti sudah terbentuk, mereka akan melakukan penyuluhan kepada remaja-remaja di pedesaan, di daerah lingkungan pinggiran. Dan ternyata sudah dikumpulkan informasi daerah mana yang akan dijadikan sasaran penyuluhan dari satgas tersebut.

Yang menjadi target utamanya adalah anak-anak jalanan yang sering menyalahgunakan narkoba dengan menghirup lem. Diceritakan juga bahwa dari 5 personel yang akan menjadi pelopor pembentukan satgas tersebut, sudah melakukan kunjungan dan berkoordinasi dengan ibu-ibu PKK dari lingkungan yang akan dilakukan penyuluhan. Dan ternyata pihak dari ibu-ibu PKK tersebut sangat antusias menerima maksud dari kunjungan mereka, dan bersedia memberikan tempat dan membantu segala hal yang akan diperlukan dalam kegiatan penyuluhan tersebut.

Dan diharapkan BNN sebagai partner, nantinya akan membantu dengan mengikutkan tenaga penyuluhnya untuk melakukan penyuluhan di dalam lingkungan tersebut. Mereka juga sangat berharap dengan adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat dari BNN yang diberikan kepada mereka, dapat

mereka salurkan ilmu yang didapat untuk melakukan penyuluhan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Dan yang menarik menurut mirna, buku saku BNN yang diberikan kepadanya. Karena bisa memberikan informasi yang dibutuhkan dalam hal untuk menambah pengetahuan tentang narkoba dan tentang pencegahannya.

Dan yang mereka akan lakukan pertama kali nanti adalah untuk mengenalkan tentang narkoba itu apa dan dampaknya apa yang akan mereka alami jika menjadi pecandu narkoba.

Mirna berpendapat bahwa apabila mereka mengadakan kegiatan apapun nantinya, yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat, dia berjanji akan membuat laporannya kepada BNN. Karena setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah ada laporan pertanggungjawabannya (LPJ).

Dijelaskan juga oleh penulis, bahwa setelah kegiatan program pemberdayaan masyarakat tersebut, akan dilakukan monitoring dan evaluasi tentang kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut. Dan diharapkan para peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat melaksanakan kegiatan sendiri sebagai lanjutan dari program yang dilaksanakan oleh BNN. Dari sinilah akan terlihat bagaimana efektivitas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut karena kegiatan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN akan mencapai sasaran apabila peserta kegiatan pemberdayaan dapat membentuk satgas yang mampu melaksanakan kegiatan sendiri dalam hal pengenalan tentang narkoba, bahaya narkoba dan dampak yang akan didapatkan apabila menyalahgunakan narkoba.

Dengan adanya kegiatan lanjutan yang dilaksanakan oleh satgas dari program pemberdayaan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN tersebut, maka akan semakin meringankan kerja BNN karena perang melawan narkoba itu bukan hanya tugas BNN semata, melainkan merupakan tugas dan kewajiban setiap lapisan masyarakat. Karena dari hasil penelitian yang pernah dilaksanakan oleh Puslitdatin BNN, yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba adalah seluruh lapisan masyarakat, baik dari golongan bawah, menengah dan atas, tidak peduli apapun tingkat pendidikannya.

Dan di akhir wawancara, Mirna mengajukan pertanyaan tentang apa yang akan dilakukan oleh BNN apabila mereka akan melakukan kegiatan dalam rangka

penyuluhan atau pemberdayaan masyarakat. Pertanyaan ini akan penulis sampaikan kepada pihak yang terkait, dalam hal ini Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN karena penulis tidak mempunyai wewenang dalam menjawab pertanyaan tersebut.

3. Informan III : Abdul Rahman Yacob

Beliau adalah Ketua Satgas Anti Narkotika dan Minuman Keras (Anarmuna) Universitas Nasional. Beliau juga aktif di dalam Kepala Pusat Studi dan Bantuan Hukum Universitas Nasional. Beliau baru menjabat sebagai ketua Satgas Anarmuna selama 1 (satu) bulan, dimana sebelumnya beliau menjadi anggotanya.

Satgas ini sudah terbentuk selama 2 (dua) periode, dimana satu periodenya adalah dua tahun. Yang menjadi pegangan dari satgas ini adalah peraturan khusus sesuai dengan SK Rektor Nomor 62A/2000 (tata Tertib Kampus) tentang Narkoba.

Tugas dari satgas ini adalah untuk :

1. Pengawasan (monitoring)
2. Memberikan informasi (sosialisasi, kampanye)
3. Membentuk sel-sel di dalam lingkungan mahasiswa

Peraturan ini sudah diberitahukan sejak seorang calon mahasiswa akan mendaftar di Universitas Nasional dan dilaksanakan perjanjian antara orang tua dari pihak calon mahasiswa dengan pihak Universitas.

Dalam artian apabila kedatangan ada mahasiswa yang tertangkap memakai narkoba di dalam lingkungan kampus, maka akan diperiksa terlebih dahulu oleh satgas, dan akan ditangani sebagai anak didik bukan sebagai penjahat. Dari situ akan dinilai apakah mahasiswa tersebut dapat diperbaiki atau tidak. Kalau tidak bisa diperbaiki, akan diberikan hukuman, mulai dari skorsing satu semester, dua semester, dan yang terberat adalah akan dikeluarkan. Pada saat kapan mahasiswa tersebut dikeluarkan, adalah pada saat dia sudah tertangkap dua sampai tiga kali. Atau pada saat menjalani masa skorsing, tertangkap sedang memakai narkoba lagi atau setelah masa skorsing tertangkap memakai narkoba lagi.

Pendapat beliau tentang satgas ini adalah, bahwa satgas yang dipimpinnya tersebut adalah suatu gerakan dimana semua orang dapat terlibat. Dan berharap kepada Rektor, bahwa satgas ini harus bisa lintas unit kerja di dalam lingkungan kampus.

Karena begitu ada penerimaan mahasiswa baru, akan dilaksanakan pemeriksaan urine bagi calon mahasiswa dan pihak satgas harus dilibatkan. Seandainya ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di luar kapus, beliau berharap pihak satgas juga dilibatkan.

Ketika pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diadakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat, beliau mengharapkan kepada Badan Narkotika Nasional agar tiap kampus diberikan kebebasan melaksanakan caranya sendiri dalam melakukan penanganan kasus narkoba di lingkungannya. Karena karakter mahasiswa setiap kampus juga berbeda-beda.

Berkaitan dengan adanya Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai wajib lapor, mereka menyadari bahwa peraturan tata tertib kampus mereka belum mengakomodir tentang permasalahan rehabilitasi bagi para mahasiswa yang menjadi penyalahguna narkoba. Dan mereka sedang mengusulkan kepada Rektor agar peraturan lama SK Rektor Nomor 62A/2000 (tata Tertib Kampus) tentang Narkoba bisa diperbaharui guna mengikuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai wajib lapor tersebut.

Mereka mengakui, salah satu masukan yang dilaporkan ke Rektor adalah merupakan hasil dari program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN. Dan ada salah satu klausul yang dianulir yang akan menjadi pembaharuan yaitu mengenai mahasiswa yang diserahkan orangtuanya untuk menjalani rehabilitasi. Masih dibahas mengenai bagaimana status mahasiswa yang sedang menjalani perawatan rehabilitasi medis tersebut.

Mengenai kegiatan itu sendiri, beliau berpendapat bahwa kegiatan tersebut memberi pengetahuan mahasiswa tentang narkoba sehingga mahasiswa diharapkan untuk takut akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba, tetapi itupun belum menjamin walaupun mereka takut, mereka tidak akan memakai.

Dari ketiga tugas utama dari satgas tersebut, yang terberat adalah membentuk sel-sel di tengah-tengah kehidupan mahasiswa. Jadi pilihannya dalam

masa orientasi mahasiswa baru, disitu akan direkrut mahasiswa-mahasiswa baru sebagai kader yang belum terkontaminasi oleh pergaulan kampus yang tidak benar. Dari seluruh mahasiswa baru tersebut, nantinya akan dipilih sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) orang mahasiswa dari seluruh Fakultas yang ada. Target utamanya adalah disitu. Jadi, nantinya pada saat penerimaan mahasiswa baru, pihak satgas akan meminta satu waktu khusus untuk melakukan suatu kegiatan penyuluhan untuk melakukan pembinaan bagi para mahasiswa baru tersebut. Menurut beliau, hal itulah yang terbaik dilakukan untuk program pencegahan sejak dini.

Ketika menyinggung tentang materi yang disampaikan oleh narasumber dari BNN pada saat kegiatan pemberdayaan tersebut, pak Yacob berpendapat bahwa materi tersebut sudah ketinggalan jaman. Karena menurut beliau, metodologi yang dipakai oleh narasumber BNN tersebut sudah tidak cocok untuk keadaan di tahun 2011 ini. Karena materi yang disampaikan tersebut masih berpatokan bahwa Indonesia adalah negara transit, sedangkan di masa sekarang ini, Indonesia adalah sebagai negara produsen dan pemakai terbesar dari narkoba.

Beliau ternyata mempunyai pendapat yang berbeda tentang perlakuan BNN terhadap para pelaku penyalahguna narkoba yang harus diperlakukan secara welas asih sebagai korban. Karena menurut beliau, harus ditanamkan kesadaran bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut adalah kejahatan, yang di negara manapun juga menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba itu adalah kejahatan. Diharapkan bahwa siapapun yang memakai sebaiknya langsung divonis penjara, selesai. Hal ini akan menimbulkan efek jera bagi para penyalahguna narkoba.

Beliau juga mengharapkan bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN lebih memfokuskan kepada hal-hal lain yang juga memicu terjadinya peningkatan penyalahgunaan narkoba. Karena menurut beliau, pada saat ekonomi masyarakat kelas bawah terpuruk, pengguna narkoba di level bawah akan meningkat.

Disinggung juga mengenai harusnya diungkapkan tentang data korban HIV/AIDS sebagai akibat dari penyalahgunaan narkoba. Karena para penyalahguna narkoba menggunakan jarum suntik adalah salah satu penyebab terbesar dari penyebaran dari HIV/AIDS.

Kampus, menurut beliau adalah berada di dalam level *middle class*. Di mana kampus Universitas Nasional tentu berbeda dengan Universitas Gunadarma ataupun Universitas Pelita Harapan. Jadi diharapkan adanya model-model pemberdayaan yang sesuai dengan masing-masing kampus tersebut.

Ada tambahan dari beliau, bahwa komitmen Universitas Nasional dalam meminimalisir lokasi-lokasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk menggunakan narkoba sudah dilaksanakan sejak lama. Salah satu contohnya adalah, bahwa dulu kantin-kantin di dalam lingkungan Universitas Nasional adalah model tertutup, sehingga segala aktivitas yang dilakukan di dalam kantin tersebut tidak dapat terpantau dari luar. Hal ini diatasi dengan merubah kantin-kantin tersebut menjadi kantin yang terbuka. Sehingga segala aktivitas mahasiswa yang dilakukan di dalam kantin tersebut dapat terpantau dari jauh. Tetapi memang masih ada satu lokasi yang masih sulit untuk melakukan pengawasan, yaitu di area GSG (Gedung Serba Guna) kampus. GSG itu konsep pembangunannya dulu adalah pusat kegiatan kemahasiswaan dan perpustakaan digabungkan dengan harapan para mahasiswa senang ke perpustakaan. Ternyata tujuan itu sampai sekarang belum terwujud. Bahkan mereka sering menerima pendapat yang menganggap aneh ketika gedung kegiatan olahraga mahasiswa dengan perpustakaan digabung menjadi satu.

Yang menjadi permasalahan adalah, di sekeliling gedung tersebut terdapat ruang-ruang kegiatan mahasiswa yang memanfaatkan koridor-koridor yang kemudian disekat-sekat sehingga aktivitas kegiatan mahasiswa di dalamnya sulit terpantau dari luar, terutama oleh pihak keamanan kampus maupun pihak Satgas Anarmuna. Dan mereka masih sedang mengupayakan bagaimana caranya pengawasan dilakukan bisa sampai ke area tersebut. Dan walaupun sudah terpasang cctv, masih belum banyak membantu dalam pengawasan tersebut.

Jadi, menurut mereka dalam program menjadikan kampus yang bebas narkoba memang masih memerlukan proses yang panjang, tidak bisa secara singkat. Dalam artian, semuanya dilakukan bertahap dimulai dengan mengurangi kantong-kantong yang disinyalir dapat menjadi tempat dari penyalahgunaan narkoba. Karena tidak bisa langsung menjadikan kampus yang benar-benar bersih dari narkoba.

Berbicara mengenai pemberdayaan masyarakat di lingkungan Universitas Nasional, beliau menuturkan bahwa perlu juga diadakannya pendekatan terhadap lingkungan di sekitar kampus, karena di lokasi tersebutlah lingkungan tempat tinggal dari mahasiswa berada. Diharapkan juga adanya koordinasi dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kabupater / Kotamaday (BNNK/Kota) dengan pihak Kecamatan dan Kelurahan yang berada di sekitar lingkungan kampus agar program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN dapat bersinergi secara maksimal.

Dan diharapkan juga adanya bantuan BNN untuk mengakomodir kerjasama antara Satgas Antarmuna dengan pihak Muspida di lingkungan sekitar kampus agar juga membantu dalam hal pengawasan terhadap rumah-rumah kos yang berada di sekitar kampus. Apabila hal ini dapat terlaksana juga, bukan tidak mungkin harapan akan kampus yang bebas narkoba 2012 akan dapat terwujud.

4 Informan IV : Fathir Ashfath

Mahasiswa tingkat tiga dari Universitas Gunadarma ini adalah Presiden dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Informan penulis ini adalah mahasiswa tingkat tiga yang mengambil Jurusan Akuntansi di Fakultas Ekonomi.

Menurut Fathir, di Universitas Gunadarma memang ada peraturan khusus mengenai penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus. Tetapi selama dia menjadi mahasiswa disana, belum pernah ditemui adanya pemberian sanksi yang terkait dengan pelanggaran akibat penyalahgunaan narkoba.

Dan walaupun dia mendapati adanya penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan kampus, dia akan melakukan koordinasi dengan pihak kemahasiswaan kampus, tokoh masyarakat sekitar, dan pihak berwenang untuk menindak dan memprosesnya sesuai ketentuan yang ada.

Mengenai kegiatan yang diadakan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN, Fathir berpendapat akan mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut. Dan juga ternyata pihak manajemen kampus pun juga sangat mendukung adanya kegiatan ini.

Ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung kegiatan ini, antara lain Mengadakan seminar tentang penyuluhan dan pemberbedayaan mahasiswa anti narkoba berkerja sama dengan BNN atau instansi lainnya, Melakukan publikasi anti narkoba di seluruh media kampus yang ada.

Ketika disinggung tentang satgas anti narkoba di kampusnya, Fathir memberikan informasi bahwa memang belum ada satgas khusus yang dibentuk untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba. Tetapi kepada setiap mahasiswa baru, diwajibkan untuk mengikuti test urine.

Memang diakui, ada beberapa temannya yang menjadi penyalahguna narkoba, dan diakui juga bahwa dampak dari penyalahgunaan narkoba akan mempengaruhi kinerja dan produktivitas dari mahasiswa tersebut. Bahkan dia berjanji akan berusaha melakukan pendekatan kepada temannya tersebut untuk dibawa ke tempat rehabilitasi ataupun dia juga bersedia akan melaporkan rekannya tersebut kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan rehabilitasi.

Menurut Fathir, faktor terbesar dari maraknya peredaran narkoba di lingkungan sekitar kampus adalah karena pergaulan dan tingkat transisi. Akan tetapi, ternyata dia kurang tertarik dengan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN tersebut dan juga tidak mau berpartisipasi, tanpa memberikan penjelasan rinci lagi tentang kenapa dia tidak tertarik.

Tentang materi yang diberikan oleh narasumber, menurut dia cukup relevan dan narasumbernya cukup ahli di bidangnya. Dijelaskan pula dengan adanya kegiatan tersebut, dapat menambah pengetahuannya tentang bahaya, cara pencegahan, dan perundang-undangan tentang narkoba. Dan diapun bersedia untuk memberikan informasi yang didapat untuk disampaikan kepada teman-temannya yang lain.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 569 /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 14 Juni 2011

Kepada Yth,
Rektor Universitas Paramadina
di Jakarta

Dengan hormat,

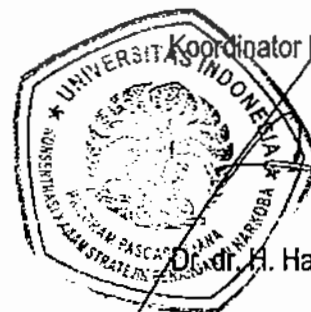
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang **"Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : James Ricky Tampubolon

NPM : 0906505331

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

[Signature]
Dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 610/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Juni 2011

Kepada Yth,
Narasumber Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN
di Jakarta

Dengan hormat,

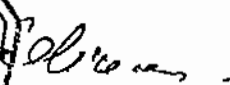
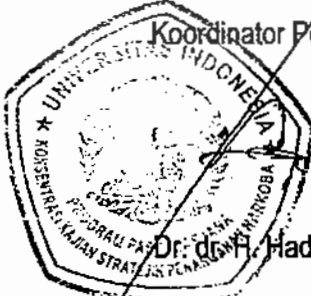
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang **"Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : James Ricky Tampubolon

NPM : 0906505331

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Dr. H. Hadiman, SH., MSc.




UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 609/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Juni 2011

Kepada Yth,
Kasubdit Lingkungan Pendidikan Tinggi Dan Menengah BNN
di Jakarta

Dengan hormat,

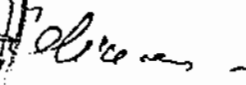
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang **"Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : James Ricky Tampubolon

NPM : 0906505331

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 608/H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Juni 2011

Kepada Yth,
Kasubdit Lingkungan Kerja Dan Masyarakat BNN
di Jakarta

Dengan hormat,

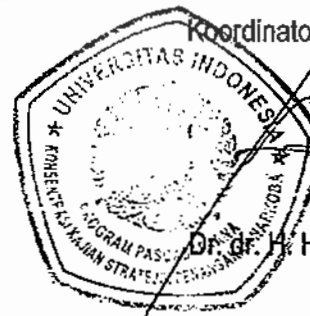
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang **"Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : James Ricky Tampubolon

NPM : 0906505331

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. G. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA

JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430
TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 605 /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 15 Juni 2011

Kepada Yth,
PT. Mustika Ratu
di Jakarta

Dengan hormat,

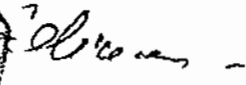
Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang **"Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : James Ricky Tampubolon

NPM : 0906505331

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 546 /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Jakarta, 13 Mei 2011

Kepada Yth,
Human Resources Department & Training Section
PT. Sanyo Jaya Components Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang **"Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : James Ricky Tampubolon

NPM : 0906505331

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Koordinator Peminatan

Dr. dr. Hadiman, SH., MSc.




UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEJIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 570 /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan ijin Wawancara

Jakarta, 14 Juni 2011

Kepada Yth,
Rektor Universitas Nasional
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang **"Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : James Ricky Tampubolon

NPM : 0906505331

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Dr. H. Hadiman, SH., MSc.



UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI PENGKAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KONSENTRASI KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA
JL. SALEMBA RAYA 4 JAKARTA 10430

TELP. (021) 3910448, (021) 70717620, 3100059 PES - 18, FAX. (021) 3910448

Nomor : 571 /H2.F13.KKN-PN/PDP.04.02/2011
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin Wawancara

Jakarta, 14 Juni 2011

Kepada Yth,
Rektor Universitas Gunadarma
di Jakarta

Dengan hormat,

Berkenaan dengan Kegiatan Akademik Program Pascasarjana Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional, mahasiswa kami bermaksud untuk memperoleh data dan wawancara tentang **"Efektivitas Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Dalam Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Terhadap Bahaya Narkoba"**.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak agar dapat kiranya memberikan ijin kepada :

Nama : James Ricky Tampubolon

NPM : 0906505331

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.



Koordinator Peminatan

Hediman, SH., MSc.